

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan Kinerja Tahun 2019 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Kontrak Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Laporan Kinerja memiliki fungsi secara eksternal sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan pendekatan kuantitatif, dan sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan. Sedangkan secara internal diharapkan laporan ini dapat memacu peningkatan kinerja setiap seksi/subbagian yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan.

Disamping itu, penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang dipercayakan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan.

LAKIN KPPN Painan Tahun 2019 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN KPPN Painan tahun 2019 diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya pegawai KPPN Painan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Painan, 21 Januari 2020
Kepala KPPN Painan



Lita Qadafina Hardian
NIP 197509251995112001

d.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2019 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja sebagaimana mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Painan tahun 2019. Pencapaian kinerja KPPN Painan pada tahun 2019 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antara lain:

1. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 97,68% dari target 88%;
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas terealisasi sebesar 99,36 dari target 94;
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terrealisasi sebesar 4,9 dari target 4,53;
4. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar 100% dari target 98,1%;
5. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah terealisasi sebesar Indeks 5 dari target Indeks 4,5;
6. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu 99,72% dari target 99,40%;
7. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker terealisasi sebesar 100% dari target 90%;
8. Persentase akurasi penyaluran dana SP2D terealisasi sebesar 99,96% dari target 99%;
9. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 88,75 dari target 86;
10. Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi Sakti terealisasi sebesar 100% dari target 95%;
11. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu terealisasi sebesar 99,78% dari target 97,5%;
12. Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terealisasi sebesar 97,35 dari target 75;
13. Nilai rata rata *hard competency* pegawai terealisasi sebesar 87,17 dari target 77;
14. Persentase Kualitas Pelaksanaan *Coaching* dan *Counseling* terealisasi sebesar 99,31% dari target 65%;
15. Indeks Kualitas Pelaksanaan Literasi Perbendaharaan terealisasi sebesar 89,25 dari target 72;
16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 95,83 dari target 75;
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 86,98 dari target 83;
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar terealisasi sebesar 103,69% dari target 92%;
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 98,86% dari target 95%;

B. Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah:

1. (N I H I L)

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk kinerja yang belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, selanjutnya dapat ditingkatkan sehingga mencapai kinerja sebagaimana diharapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Peran Strategis	6
D. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	13
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	69
C. Kinerja Lain-Lain	72
BAB IV PENUTUP	78
LAMPIRAN	
▪ Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Painan 2019	
▪ Formulir Pengukuran Kinerja KPPN Painan 2019	
▪ Rencana Kinerja Tahunan KPPN Painan 2019	
▪ Form II ADIK Rencana Kerja dan Anggaran KPPN Painan Tahun 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. PERAN STRATEGIS
- D. SISTEMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe A2 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja Tahun 2019 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Kontrak Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Painan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara,
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran,

3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya KPPN Painan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan kehumasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi KPPN

Subbagian Umum;

Yang mempunyai tugas tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, penatausahaan user SPAN, penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.

Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker;

Yang mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak, data supplier, belanja pegawai satker, dan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker, serta melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN, dan penyediaan layanan perbendaharaan.

Seksi Bank;

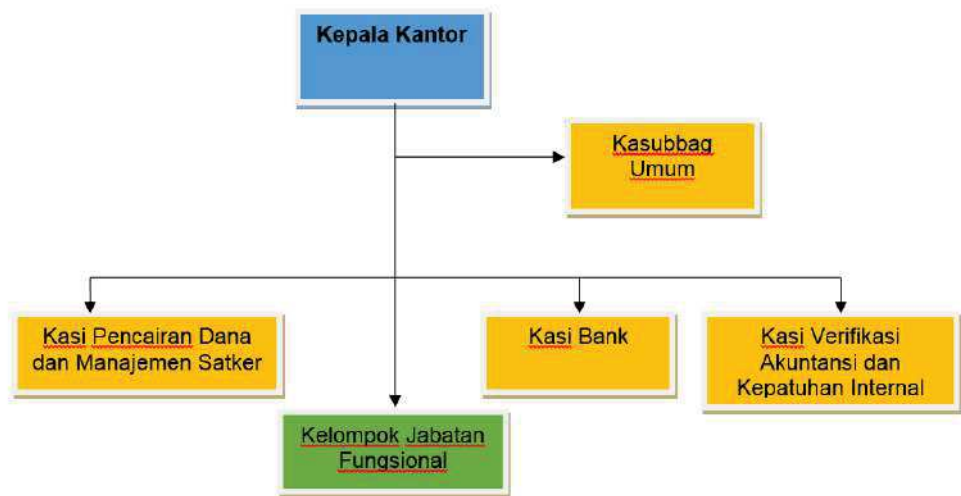
Yang mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management, penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan

Bendahara serta penatausahaan penerimaan negara. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Mengelola PFK dan SIKP.

Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal

Yang mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, realisasi dan analisis kinerja anggaran, analisis data statistik laporan keuangan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Secara lebih rinci struktur organisasi KPPN Painan di gambarkan dalam bagan di bawah ini :





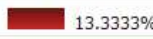

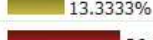












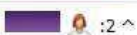





Sumber Daya Manusia Ditjen Perbendaharaan

Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Jumlah SDM Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan per 31 Desember tahun 2019 adalah sebanyak 15 orang pegawai, dengan statistik sebagai berikut :

TABEL 1.1
SDM KPPN Painan Per 31 Desember 2019

Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin		
	Jenis Kelamin	Jumlah
-	L	4 orang
-	P	11 orang
	Jumlah	15 orang

Statistik Pegawai Berdasarkan Usia		
Usia		Jumlah
- Usia 20 s.d. 29 (tahun)		5 orang
- Usia 30 s.d. 39 (tahun)		1 orang
- Usia 40 s.d. 49 (tahun)		4 orang
- Usia 50 s.d. 59 (tahun)		5 orang
Jumlah		15 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi		
Kelompok Generasi		Jumlah
- Baby Boomers (1945 - 1964)		2 orang
- Generation X (1965 - 1979)		7 orang
- Generation Y (1980 - 1994)		2 orang
- Gen Z (1995 ~)		4 orang
Jumlah		15 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan		
Pangkat	Gol.	Jumlah
- Pengatur Muda	II/a	
- Pengatur	II/c	
- Pengatur Tingkat I	II/d	
- Penata Muda Tingkat I	III/b	
- Penata	III/c	
- Penata Tingkat I	III/d	
- Pembina	IV/a	
Jumlah		15 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Eselon		
Eselon		Jumlah
- III.A		1 orang
- IV.A		4 orang
- Pelaksana		10 orang
Jumlah		15 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
Pendidikan		Jumlah
- Sekolah Menengah Atas		4 orang
- Diploma I (PKN STAN)		2 orang
- Diploma III (PKN STAN)		3 orang
- Strata I / Sarjana		5 orang
- Strata II / Magister		1 orang
Jumlah		15 orang

Beberapa kegiatan internal telah dilakukan KPPN Painan dalam meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas para pegawai yaitu sebagai berikut:

1. Gugus Kendali Mutu (GKM), minimal dilaksanakan sekali dalam seminggu untuk menyamakan persepsi/pemahaman terhadap aturan-aturan terbaru yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

2. *Briefing* pagi, Setiap hari senin dan kamis pagi (kecuali minggu pertama) sebelum jam layanan dibuka, KPPN Painan mengadakan Briefing pagi yang diisi dengan doa bersama, internalisasi strategi organisasi KPPN Painan, Visi dan Misi DJPb serta Visi dan Misi KPPN Painan, kemudian salah satu orang memberikan informasi positif serta sekaligus membahas *issue* terbaru terkait pelaksanaan tugas.
3. *Sharing Knowledge*, merupakan transfer knowledge dari pegawai yang telah melaksanakan diklat atau bimtek kepada para pegawai.
4. Pelatihan *Service Excellent*, Pelatihan ini diadakan dua kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja KPPN Painan.
5. Pemilhan Pegawai Teladan, kegiatan ini untuk memotivasi para pegawai untuk meningkatkan kinerja.
6. *Capacity Building*, kegiatan ini dilakukan dua kali dalam setahun untuk meningkatkan kekompakan dan kerja sama diantara para pegawai. Sehingga dapat menciptakan sinergi yang baik di KPPN Painan.

C. PERAN STRATEGIS

Disamping selaku pengemban kewenangan kebendaharaan, Menteri Keuangan juga selaku Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Fungsi pengawasan disini terbatas pada aspek *rechmatigheid* dan *wetmatigheid* yang dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran. Pengujian secara *rechmatigheid* dapat diartikan sebagai pengujian formal terhadap pihak yang berhak mengajukan tagihan pada negara berdasarkan bukti –bukti yang sah. Sedangkan pengujian secara *wetmatigheid* dapat diartikan sebagai pengujian atas ketersediaan dana dalam APBN/DIPA.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, peran strategis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah,
3. Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat KPPN.

Sebagai suatu organisasi terbuka, KPPN Painan berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal, seperti teknologi, ekonomi, undang-undang, dan faktor sosial kemasyarakatan, serta selalu berusaha menggunakan

teknologi yang tepat guna dan menjadi organisasi pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki role model dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan.

Tuntutan masyarakat akan pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja merupakan faktor pendorong bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi, selain kebutuhan internal pemerintah sendiri. Sebagai pioner, Kementerian Keuangan telah memulai proses reformasi sejak tahun 2004. Perubahan yang dilaksanakan mencakup aspek penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai suatu sistem berbasis teknologi informasi ditujukan untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tersebut. Seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas dan pelaporan diintegrasikan ke dalam SPAN.

Perubahan yang paling mendasar yang diusung SPAN adalah otomasi proses bisnis yang dijalankan di Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Proses-proses yang sifatnya pengulangan (*repetition*) yang selama ini dilaksanakan secara manual akan diotomasi oleh sistem. Perubahan lainnya adalah:

- penggunaan database tunggal yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri baik di tingkat pusat, unit vertikal maupun satuan kerja
- perekaman data sekali yang sebelumnya dilaksanakan di setiap unit yang terkait, dan
- pembakuan *business rules* untuk semua proses serta analisis.

Perubahan yang signifikan tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Kementerian Keuangan (internal), maupun dari kementerian/lembaga (eksternal).

Pembangunan dan implementasi SPAN melibatkan banyak pihak, baik lingkungan internal Kementerian Keuangan maupun pihak eksternal seperti kementerian lembaga, Bank Indonesia dan perbankan umum. Mengingat luasnya cakupan SPAN dan banyaknya pihak-pihak yang terlibat, dibutuhkan kesepahaman dan dukungan yang kuat dari seluruh *stakeholders*.

Selama tahun 2019, terdapat beberapa isu yang dihadapi KPPN Painan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyalurannya dilakukan oleh 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, salah satunya melalui KPPN Painan. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian *output* atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Dengan melaksanakan penyaluran melalui KPPN di daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Penyaluran DAK Fisik yang dilaksanakan KPPN Painan meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dengan DIPA DAK Fisik sebesar Rp.172.961.057.000,- dan Dana Desa sebesar Rp.166.305.833.000,-

➤ Penyaluran DAK Fisik

DAK Fisik sebesar Rp.172.961.057.000,- untuk disalurkan ke 18 bidang dalam tiga jenis, yaitu: Reguler (bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang SIKM, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, dan bidang jalan), Penugasan (bidang kesehatan, bidang air minum, bidang irigasi, bidang pasar, dan bidang LHK), serta Afirmasi (bidang transportasi, bidang pendidikan, bidang air minum, dan bidang sanitasi).

Realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019 Kab.Pesisir Selatan

No	Jenis	Bidang	Akun	Pagu	Realisasi			
					Sekaligus	Tahap I (25%)	Tahap II(45%)	Tahap III (30%)
1	Reguler	Bidang Pendidikan	631111	23.277.485.000		5.819.371.250	10.474.868.250	6.749.784.815
2	Reguler	Bidang Kesehatan	631111	41.822.938.000	22.845.823.442	4.364.639.000	7.856.350.200	4.731.659.363
3	Reguler	Bidang Air Minum	631111	3.260.511.000		815.127.750	1.467.229.950	852.742.800
4	Reguler	Bidang Sanitasi	631111	2.205.808.000		551.452.000	992.613.600	661.742.400
5	Reguler	Bidang Industri Kecil/Menengah	631111	14.500.000.000		3.625.000.000	6.525.000.000	3.766.082.843
6	Reguler	Bidang Pertanian	631111	3.527.834.000		881.953.500	1.587.516.300	1.052.542.200
7	Reguler	Bidang Kelautan dan Perikanan	631111	1.724.220.000		431.055.000	775.899.000	434.535.000
8	Reguler	Bidang Pariwisata	631111	1.900.813.000		475.203.250	855.365.850	365.989.889
9	Reguler	Bidang Jalan	631111	53.431.450.000		13.357.862.500	24.044.152.500	16.021.682.000
10	Penugasan	Bidang Kesehatan	631212	822.806.000	763.572.629			
11	Penugasan	Bidang Air Minum	631212	2.775.000.000		693.750.000	1.248.750.000	695.129.500
12	Penugasan	Bidang Irigasi	631212	6.980.083.000		1.745.020.750	3.141.037.350	1.421.364.458
13	Penugasan	Bidang Pasar	631212	2.933.132.000		733.283.000	1.319.909.400	582.152.600
14	Penugasan	Bidang LHK	631212	848.465.000	193.318.200			
15	Afirmasi	Bidang Transportasi	631311	5.177.500.000	871.600.000	1.064.375.000	1.915.875.000	501.897.370
16	Afirmasi	Bidang Pendidikan	631311	1.085.276.000		271.319.000	488.374.200	325.582.800
17	Afirmasi	Bidang Air Minum	631311	4.587.756.000		1.146.939.000	2.064.490.200	1.374.909.800
18	Afirmasi	Bidang Sanitasi	631311	2.100.000.000		525.000.000	945.000.000	630.000.000
Jumlah Total				172.961.057.000	24.674.314.271	36.501.351.000	65.702.431.800	36.488.680.675

➤ Penyaluran Dana Desa

Dana Desa sebesar Rp.166.305.833.000,- untuk didistribusikan ke 182 nagari sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 serta tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 41 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

No	Akun	Pagu	Jumlah Transfer			
			Tahap I (20%)	Tahap II(40%)	Tahap III(40%)	Jumlah
1	662111	166.305.833.000	33.261.166.600	66.522.333.200	66.522.333.200	166.305.833.000
Jumlah Total		166.305.833.000	33.261.166.600	66.522.333.200	66.522.333.200	166.305.833.000

2. Implementasi SAKTI Satker Lingkup Kementerian/Lembaga

Dalam rangka implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2019 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, KPPN Painan telah melakukan tahapan demi tahapan dalam implementasi SAKTI ini, Yaitu:

- a. Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap I untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK
- b. FGD/Sosialisasi SAKTI tahap I untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK

- c. FGD/Sosialisasi SAKTI tahap II untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK
- d. Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap II untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK
- e. Training modul admin dan penganggaran SAKTI berbasis web
- f. Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap III untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK
- g. Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap IV untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK
- h. Pendampingan SAKTI berbasis web untuk modul admin dan penganggaran

3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Isu IKPA ini merupakan yang sedang *hot* diperbincangkan dalam tahun 2019, dimana seluruh satker dinilai kinerja pelaksanaan anggarannya berdasarkan IKPA. Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara internal diminta serius untuk mendapatkan nilai IKPA paling tinggi diantara satuan kerja lainnya. Hal ini karena Ditjen Perbendaharaan bertindak selaku pembina pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Negara dan penilaian IKPA menjadi salah satu penentu pemberian *reward* untuk DIPA tahun anggaran berikutnya. Pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran tersebut meliputi empat aspek yang dijabarkan dalam 12 indikator (IKPA), yaitu:

Aspek	IKPA
Kesesuaian dengan perencanaan	1. Revisi DIPA
	2. Halaman III DIPA
	3. Pagu Minus
Kepatuhan terhadap regulasi	4. Pengelolaan UP
	5. Rekonsiliasi LPJ Bendahara
	6. Data Kontrak
	7. Dispensasi SPM
Efektivitas pelaksanaan kegiatan	8. Penyelesaian tagihan
	9. Penyerapan Anggaran
	10. Retur SP2D
Efisiensi pelaksanaan kegiatan	11. Perencanaan Kas
	12. Pengembalian SPM

Sedangkan isu lain yang tidak berkaitan secara langsung dalam pengelolaan APBN selama tahun 2019 diantaranya adalah penerapan SMM ISO 9001:2015 dan mengikuti Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN Painan dimana KPPN Painan berhasil mendapatkan Sertifikat WBK dari Menteri Keuangan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPPN Painan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
 - C. Kinerja Lain-Lain
4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran
Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Painan Tahun 2019, Formulir Pengukuran Kinerja 2019, dan Rencana Kinerja Tahunan 2019, dan Form II ADIK Rencana Kinerja dan Anggaran KPPN Painan Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS**
- B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis termuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang diuraikan secara konseptual.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut arah dan tujuan instansi agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi menggambarkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Sedangkan misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi itu sendiri.

Visi dan Misi KPPN Painan

Dengan mengacu terhadap Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan telah menetapkan visi, yaitu:

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, akuntabel dan inovatif”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi:

1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel
3. Mewujudkan pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

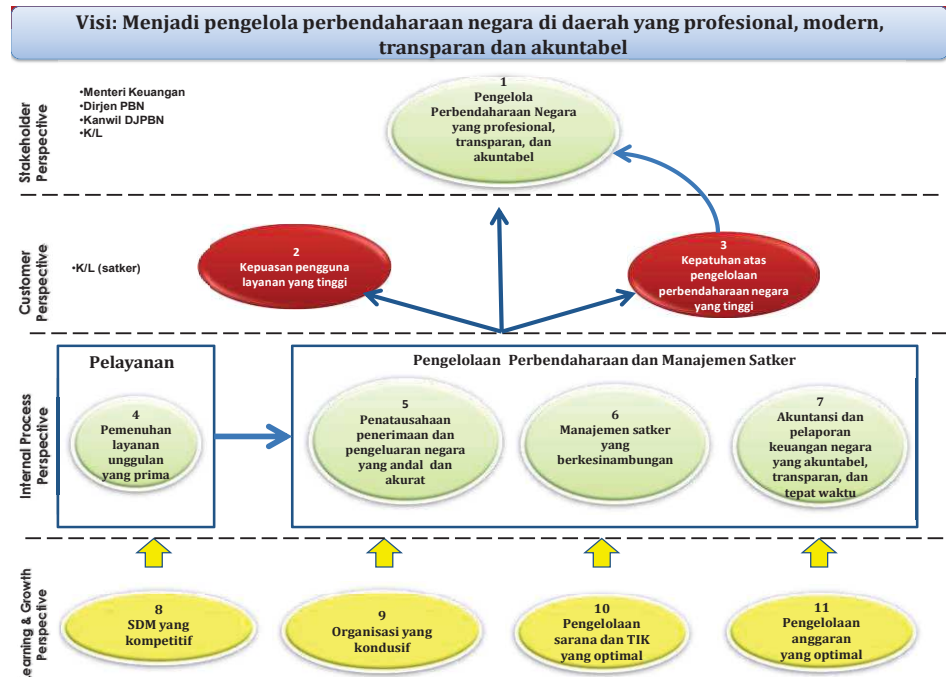
MOTTO KPPN Painan yaitu “Kami berkomitmen melayani anda dengan MOTTO **TERBAIK**” Transparan, Efektif dan Efisien, Responsif, Berkelanjutan, Andal, Inovasi, dan Kompeten.

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2019 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, dijabarkan dalam 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1
Peta Strategi Kepala KPPN Tahun 2019

Peta Strategi
Kepala KPPN
Tahun 2019



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. **Stakeholders Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. **Customer Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. **Internal Process Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. **Learning and Growth Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau

outcome organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sebelas sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

▪ **Pengelola perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel**

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Profesional, transparan dan akuntabel berarti KPPN harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Pada sasaran strategis ini, terdapat indikator kinerja berupa Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L dan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas.

2. *Customer perspective* terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

a. **Kepuasan pelanggan yang tinggi**

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi stakeholder terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah. Pada sasaran strategis ini, terdapat indikator kinerja berupa Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN.

b. **Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi**

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja (1) Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal (2) Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

a. Pemenuhan layanan unggulan yang prima

Pelayanan prima merupakan salah satu program reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders, khususnya terkait dengan pelayanan perbendaharaan. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Persentase SPM satker yang diproses menjadi SP2D.

b. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal dan akurat adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara lengkap dan akurat, penyimpanan dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi dan tertib, serta penyelesaian laporan penatausahaan transaksi keuangan secara lengkap dan tepat waktu. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa (1) Persentase akurasi rencana penarikan dana satker dan (2) Persentase akurasi penyaluran dana SP2D.

c. Manajemen satker yang berkesinambungan

Implementasi SPAN dan SAKTI akan berdampak secara signifikan terhadap pengelolaan perbendaharaan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, diperlukan suatu strategi manajemen satker, khususnya dalam memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga mereka memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang tugas Perbendaharaan. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi.

d. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta opini audit yang baik dari BPK. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa (1) Persentase penyampaian LPJ bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu dan (2) persentase exception report laporan keuangan

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

a. SDM yang kompetitif

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Nilai rata rata hard competency pegawai

b. Organisasi sehat yang kondusif

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya, dan iklim. Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa (1) Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian internal dan (2) nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

c. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Persentase barang milik negara dengan kondisi baik. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa persentase pemenuhan BMN sesuai standar

d. Pengelolaan anggaran yang optimal

Dana yang tersedia dalam DIPA KPPN Painan harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA KPPN Painan. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Painan.

Pada tahun 2019, 11 (sebelas) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPPN Painan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2018
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel	1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88%
		1b-N	Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	94
2.	Pelayanan publik yang prima	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,53 (skala 5)
3.	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		3b-N	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	4,5
4.	Pemenuhan layanan unggulan yang prima	4a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%
5.	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat	5a-CP	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%
		5b-N	Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	99%
6.	Manajemen satker yang berkesinambungan	6a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86
		6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	95%
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	7a-N	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	97,50%
		7b-N	Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	75
8.	SDM yang kompetitif	8a-N	Nilai rata – rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		8b-N	Persentase kualitas pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i>	65%
		8c-N	Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	72
9.	Organisasi <i>fit for purpose</i>	9a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	75
		9b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
10.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal	10a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	92%
11.	Pengelolaan anggaran yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2019, dalam upaya mencapai 11 (sebelas) sasaran strategis tersebut, KPPN Painan didukung pendanaan dalam 1 (satu) kegiatan dengan 4 (empat) sub output sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
08	Program: Pengelolaan Perbendaharaan Negara			
1705	Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	1.342.030.000	1.313.856.763	97,90%
1705002	Layanan Pelaksanaan Kuasa BUN di daerah	79.872.000	75.156.201	94,10%
1705003	Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	22.104.000	21.738.750	98,35%
1705951	layanan internal (overhead)	58.712.000	58.643.525	99,88%
1705994	Layanan Perkantoran	1.181.342.000	1.158.318.287	98,05%

Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, pada

tahun 2019 DJPb melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan yang dilakukan diantaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU, penetapan IKU Baru, dan penghapusan IKU dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perubahan ruang lingkup dan target IKU, yaitu:

1. IKU Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L, dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker dalam pelaksanaan anggaran. Maka diputuskan penerapan penilaian dengan indikator yang telah ditetapkan dengan penilaian IKPA.
2. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu, SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.
3. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI, IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2019 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI. Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2019, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut : Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2019 secara tepat waktu dan; Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2019.
4. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut : 1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT). 2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI). 3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM). 4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV). 5. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA).
5. Persentase Kualitas Pelaksanaan Coaching & Counseling, IKU ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui

pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai, dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja pegawai.

b. Penetapan IKU Baru

1. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal, Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang SKKI.

Pada capaian Kinerja Organisasi tahun 2019 seluruh IKU dapat menggambarkan pencapaian dari Renstra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan tahun 2015-2019, walaupun beberapa IKU mengalami *refinement* namun tetap menggambarkan pencapaian sasaran strategis.

Selanjutnya dalam rangka tetap memonitor perencanaan startegis sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis KPPN Painan tahun 2015-2019, setiap IKU Kemenkeu *Three* dilaporkan capaiannya setiap triwulan secara berjenjang dan beberapa IKU *Cascading* diturunkan ke level Kemenkeu *Four* dan *Five* termasuk IKU yang menjadi Rencana Strategis KPPN Painan Tahun 2015-2019.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- B. REALISASI ANGGARAN**
- C. KINERJA LAINNYA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

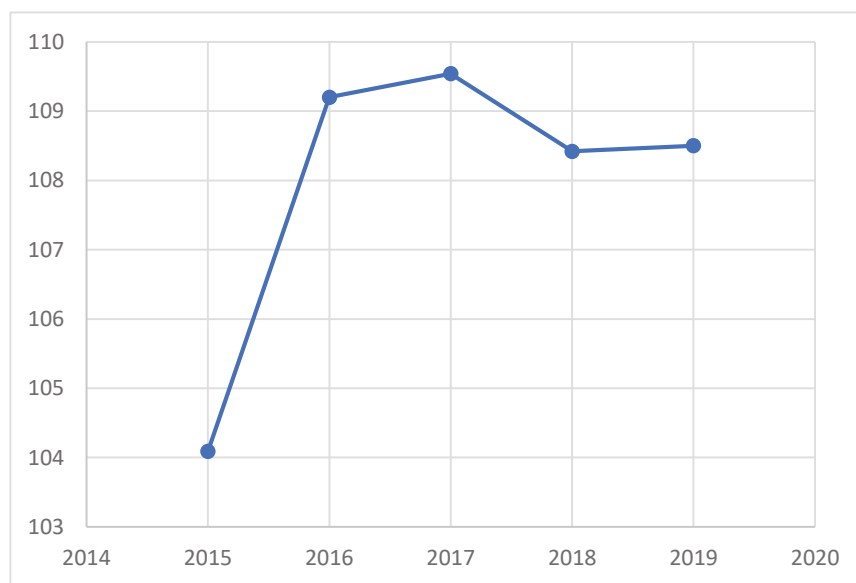
Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan adalah sebesar 108,50**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif

<i>PERSPECTIVE</i>	<i>BOBOT</i>	<i>NILAI</i>
<i>STAKEHOLDER</i>	25%	27,19%
<i>CUSTOMER PERSPEKTIF</i>	15%	16,10%
<i>INTERNAL PROCESS</i>	30%	32,69%
<i>LEARNING AND GROWTH</i>	30%	33,52%
<i>NILAI KINERJA ORGANISASI</i>		108,50

GRAFIK NKO KPPN Painan 2015 s.d 2018

Nilai Kinerja
Organisasi KPPN
Painan
Tahun 2019



Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, NKO Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2018, Nilai Kinerja Organisasi KPPN Painan mengalami penurunan. Tetapi seluruhnya telah berstatus hijau yang artinya masih mencapai target. Capaian 19 IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Capaian IKU
KPPN Painan Tahun
2019

TABEL 3.2
Capaian IKU Kemenkeu Three KPPN Painan Tahun 2019

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	W/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder Perspektif (25%)								27.19%
Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel								108.75%
1a-CP	Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran KIL	88%	97.68%	Max	PL	19%	57.58%	111.00%
1b-N	Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	94	99.36	Max	PM	14%	42.42%	105.70%
Customer Perspektif (15%)								16.10%
Pelayanan Publik yang Prima								108.17%
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.53	4.90	Max	EM	21%	100.00%	108.17%
Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi								106.52%
3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	100.00%	Max	PM	14%	50.00%	101.94%
3b-N	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	4.5	5.00	Max	PM	14%	50.00%	111.11%
Internal Process (30%)								31.69%
Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima								100.32%
4a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.72%	Max	PM	14%	100.00%	100.32%
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat								106.81%
5a-CP	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%	100.00%	Max	PL	19%	57.58%	111.11%
5b-N	Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	99.00%	99.96%	Max	PM	14%	42.42%	100.97%
Manajemen Satker yang Berkesinambungan								104.23%
6a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86	88.75	Max	PM	14%	50.00%	103.20%
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	95%	100.00%	Max	PM	14%	50.00%	105.26%
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu								111.17%
7a-N	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	97.50%	99.78%	Max	PM	14%	50.00%	102.34%
7b-N	Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	75	97.35	Max	PM	14%	50.00%	120.00%
Learning and Growth Perspektif (30%)								33.52%
SDM yang Kompetitif								117.74%
8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	87.17	Max	PM	14%	33.33%	113.21%
8b-N	Persentase kualitas pelaksanaan coaching dan	65.00%	99.31%	Max	PM	14%	33.33%	120.00%
8c-N	Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	72	89.25	Max	PM	14%	33.33%	120.00%
Organisasi yang Kondusif								112.40%
9a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	75	95.83	Max	PM	14%	50.00%	120.00%
9b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>strategy focused organization</i>	83	86.98	Max	PM	14%	50.00%	104.80%
Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal								112.71%
10a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92.00%	103.69%	Max	PM	14%	100.00%	112.71%
Pengelolaan Anggaran yang Optimal								104.06%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.00%	98.86%	Max	PM	14%	100.00%	104.06%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)								108.50%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU KPPN Painan (19 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1:

Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Profesional, transparan dan Akuntabel

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Profesional, transparan dan akuntabel berarti KPPN harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan secara

terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

TABEL 3.3
Capaian IKU pada
Sasaran Strategis
Pengelolaan
Perbendaharaan Negara
yang profesional,
transparan dan
akuntabel

**SS 1: Pengelola perbendaharaan negara
yang unggul di tingkat dunia**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88%	97,68%	111
1b-N	Nilai LK Kuasa BUN KPPN Yang Berkualitas	94	99,36	105,70

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

1a-CP Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain:

- (1) Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur melalui tingkat penyerapan anggaran DIPA K/L, dan Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan diukur melalui jumlah penerbitan SPM satker yang benar (tidak dikembalikan oleh KPPN) dan ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan. Tujuan dari penerapan IKU Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L adalah Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Target tahun 2019

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 88% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* Kepala KPPN Painan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi tahun 2019

Realisasi IKU Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2019 adalah 97,68 %. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2019 triwulanan, yaitu 99,13% (triwulan I), 97,50% (triwulan II), 96,91% (triwulan III), dan 97,17% (triwulan IV) yang diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.

TABEL 3.4
Capaian IKU *Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L* Tahun 2019

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	Maximize/
Realisasi	99,13%	97,50%	98,31	96,91%	97,85%	97,17	97,68	

Nilai Capaian	112,65	110,79	111,71	110,12	111,20	110,42	111	Average
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	---------

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 97,68% tersebut melampaui target IKU sebesar 88% (dengan nilai capaian 111) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2019. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun 2018

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 dengan tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel 3.5. Realisasi IKU pada tahun 2018 adalah 91,3%, pada tahun 2019 realisasi IKU mencapai 97,68%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi IKU dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 6,38%, Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2018 dan 2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.5.

TABEL 3.5

Perbandingan Capaian IKU *Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L* Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Realisasi						Target Tahunan	
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV		
2019	99,13 %	97,50%	98,31	96,91 %	97,85%	97,17	97,68	88%
2018	91,58 %	91,93%	91,76%	90,02 %	91,17%	91,69 %	91,3%	80%
Selisih	7,55%	5,57%	6,55%	6,89%	6,68%	5,48%	6,38%	8%

Realisasi pada tahun 2018 dan 2019 telah melewati batas target dan terjadi peningkatan capaian IKU Tahun 2019 pada setiap triwulannya dibandingkan capaian IKU tahun 2018.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Terdapat isu dalam pencapaian IKU tersebut yang perlu mendapat perhatian, yaitu Pemahaman Satker terkait pengelolaan keuangan negara yang rendah khususnya untuk Satker lingkup Kementerian Agama. Hal ini terjadi karena pejabat perbendaharaan merangkap sebagai fungsional guru sehingga Satker memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat mempelajari pengelolaan keuangan negara dibandingkan Satker lainnya.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Painan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. KPPN secara aktif melakukan pemantauan dan himbauan kepada Satker jika ditemukan adanya keterlambatan atau ketidaksesuaian yang ada pada komponen perhitungan melalui group whatsapp "Grup Diskusi KPPN Painan".
2. Melakukan pengawasan secara manual terhadap indikator yang ada agar tetap bernilai maksimal. Pengawasan yang telah dilakukan meliputi data kontrak, pengelolaan UP, LPJ, renkas, dan penyelesaian tagihan.

3. Secara persuasif menyarankan kepada Satker agar melakukan revisi halaman III DIPA untuk memperbaiki capaian pada periode triwulanan.
4. Melakukan pembinaan terhadap Satker yang memiliki nilai IKPA yang rendah dengan melakukan kunjungan terhadap Satker tersebut untuk mengetahui akar masalah yang dialami oleh Satker terkait nilai IKPA tersebut
5. Memberikan teguran tertulis kepada Satker yang terlambat menyampaikan data kontrak dan menyampaikan LPJ.
6. Memberikan penghargaan kepada Satker dengan nilai IKPA terbaik.
7. Menyampaikan hasil monitoring nilai IKPA setiap bulanan beserta langkah-langkah yang harus dilakukan Satker untuk meningkatkan IKPA

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang akan dilakukan selama tahun 2019, yaitu: Penguatan fungsi pembinaan Satker melalui FGD, kunjungan, bimbingan teknis terbatas dengan Satker yang terus menerus melakukan kesalahan atau keterlambatan atas komponen perhitungan IKU.

1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas** merupakan IKU yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN KPPN. Selain itu juga untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Negara yang Profesional, transparan dan akuntabel. Artinya KPPN harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Selanjutnya nilai realisasi IKU tersebut diperoleh dengan formula sebagai berikut:

Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Target tahun 2019

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah nilai 94. Target IKU tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi tahun 2019

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas dihitung berdasarkan hasil penilaian LK Kuasa BUN KPPN tahun 2018. Adapun capaian yang diperoleh adalah dengan nilai 99,36.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun 2018

Terjadi peningkatan capaian IKU Tahun 2019 dibandingkan capaian IKU tahun 2018 atas Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas yakni semula pada tahun 2018 menghasilkan angka capaian 97,73 menjadi 99,36 pada tahun 2019.

TABEL 3.6

Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2019	-	-	-	-	-	-	99,36	94
2018	-	-	-	-	-	-	97,73	93
Selisih	-	-	-	-	-	-	1,63%	1

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.7.

TABEL 3.7

Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	-	-	-	-	-	-	Nilai 94	Maximize/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	-	Nilai 99,36	
Nilai Capaian	-	-	-	-	-	-	105,70	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7, nilai realisasi tahunan IKU LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas (yang diperoleh pada tahun 2019) melampaui target IKU. Dari target sebesar nilai 94 dan menghasilkan realisasi capaian sebesar nilai 99.36 (dengan nilai capaian 105,70) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Painan pada tahun 2019.

*Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan*

Penyusunan LK UAKBUN saat ini menjadi lebih sederhana terbukti dengan semakin berkurangnya lampiran yang dibutuhkan dalam Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN. Sebagai contoh, sebelumnya pada penyusunan LK UAKBUN semua produk yang dihasilkan dari SPAN misalnya LO, LPE dan berbasis Kas LRA Face, LRA Detail, LRA Ikhtisar, dsb dilampirkan di dalam komponen LK UAKBUN. Saat ini hal LK UAKBUN tingkat KPPN hanya menjelaskan posisi Laporan Arus Kas dan Neraca sehingga sulit untuk mengetahui kondisi capaian realisasi yang dilihat melalui LRA. Selain itu adanya Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) atas hasil rekonsiliasi yang menyebabkan Laporan Keuangan menjadi kurang akurat serta masih adanya TDK atas hasil rekon disebabkan Satker belum secara maksimal memanfaatkan menu pada aplikasi E-Rekon. Satker hanya melakukan proses upload ADK rekon tanpa menganalisa hasil rekon maupun hasil validasi transaksi berupa pagu minus sampai pada 6 digit akun. Selain itu masih terdapat saldo tidak normal, persediaan dan aset belum diregister pada beberapa satker, sehingga berdampak pada kualitas LK UAKBUN yang disusun oleh KPPN. Adanya temuan berupa PAGU MINUS pada rincian akun 6 digitnya, sementara apabila dilihat pagu 2 digit pada akun tersebut belum minus dan kurangnya pemahaman dari satker mengenai pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. KPPN Painan telah menyusun Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN Painan setiap periodic dan tepat waktu.
2. Membimbing dan membina satker dalam tahapan rekonsiliasi keuangan tiap bulan.
3. Melakukan pemeriksaan mendetail terhadap transaksi-transaksi dan atau saldo tidak normal terhadap hasil rekonsiliasi satker agar tidak ada Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK).
4. Melakukan verifikasi detail terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara satuan kerja.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan pembinaan lebih detail terhadap proses rekonsiliasi satuan kerja.
2. Memperketat verifikasi rekonsiliasi tidak hanya pada indikator utama rekonsiliasi, tetapi juga komponen lain yang mempengaruhi laporan keuangan (seperti transaksi dalam kondirmasi, saldo tidak normal, pengembalian belanja melebihi realisasi, selisih TKTM, dll)
3. melakukan pembinaan terhadap satker-satker yang memiliki selisih pada komponen diluar indikator utama rekonsiliasi agar langsung diselesaikan di periode rekon berjalan

2. Sasaran Strategis 2: **Kepuasan pengguna layanan yang tinggi**

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.

TABEL 3.8
Capaian IKU pada Sasaran Strategis *Kepuasan pengguna layanan yang tinggi*

SS 2: Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,53 (skala 5)	4,9 (skala 5)	108,16

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN** merupakan salah satu IKU *Kemenkeu-three* Kepala KPPN Painan tahun 2019. IKU ini diukur mengacu kepada tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Target tahun 2019

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 4,53 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut meningkat dari tahun 2018 sebesar 4,52. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi tahun 2019

Hasil survey menunjukkan bahwa KPPN Painan memiliki capaian indeks kepuasan pada tahun 2019 yakni sebesar 4.90. adapun rincian capaian indeks kepuasan Satker terhadap layanan KPPN adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9.

TABEL 3.9

Rincian Skor Indeks Kepuasan Satker terhadap layanan KPPN

No	Aspek Layanan	Capaian 2018
1	Pencairan Dana	4,87
2	layanan bimbingan dan konsultasi	4,92
3	konfirmasi surat setoran	4,90
4	penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran	4,87

5	Sarana dan Prasarana	4,96
Rata Rata		4,90

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui bahwa target IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian ditunjukkan pada Tabel 3.10.

TABEL 3.10
Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	-	4,53	<i>Maximize / Take last known value</i>
Realisasi	-	-	-	-	-	-	4,90	
Nilai capaian	-	-	-	-	-	-	108,16	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10, nilai realisasi tahunan IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN tahun 2019 yakni tercapai sebesar 4,90 dari target sebesar 4,53 sehingga menghasilkan angka capaian sebesar 108,16.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Upaya peningkatan layanan yang dihasilkan KPPN Painan sudah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai KPPN untuk meningkatkan citra baik KPPN Painan sebagai ujung tombak pengelola APBN di daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan seperti perbaikan sarana dan prasarana layanan, peningkatan koordinasi dengan satker mitra kerja, penggunaan sarana informasi terkini untuk percepatan tersampainya informasi layanan KPPN misal melalui penggunaan grup whatsapp. Pengalihan web KPPN menjadi terintegrasi dengan web Kantor Pusat dan Kanwil DJPb juga membantu dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Hal ini karena penggunaan microweb tersebut merupakan bentuk standardisasi web KPPN dengan fitur, menu, dan updating informasi yang lebih lengkap. Adapun survey terkait indeks kepuasan satker telah dilaksanakan pada bulan Juni 2019 dengan sampel 18 Satuan Kerja Mitra KPPN Painan. Data capaian IKU pada bulan Juni 2019 tersebut menjadi data perhitungan capaian IKU pada periode Semester II tahun 2019.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah minimnya responden yang menjadi sampel pengukuran kinerja layanan yakni 18 responden dari 35 satker, untuk kedepannya diharapkan survey dapat dilaksanakan secara online sehingga dapat diakses oleh setiap pengguna layanan KPPN Painan. Hasil survey diharapkan mampu memberikan gambaran mendetail tentang layanan apa yang seharusnya menjadi bahan perbaikan bagi KPPN.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil identifikasi terhadap kekurangan layanan di KPPN Painan diantaranya :

1. Meningkatkan kebersihan ruang layanan dengan cara penyediaan tempat sampah tambahan, penyediaan checklist kebersihan ruangan di ruang layanan serta penerapan *clean desk* di meja layanan.
2. Usulan belanja modal tahun anggaran 2020 salah satunya adalah penyediaan A.C Split Ukuran 1 PK sebanyak 2 unit yang akan difungsikan pada ruang Front Office.
3. Implementasi WBK/WBBM dan SMM ISO 9001 : 2015 pada tahun 2019.
4. Penambahan fasilitas ruang bermain anak, parkir khusus difabel, dan fasilitas lainnya yang mendukung implementasi PUG
5. Meningkatkan layanan pencairan dana dengan memberitahukan Satker atas penolakan SPM, SKPP, atau kontrak melalui sarana tercepat yaitu Whatsapp Grup Diskusi KPPN Painan dan SMS Gateway.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu: Melengkapi setiap objek yang menjadi bagian dari pelaksanaan WBK / WBBM dan SMM ISO 9001 : 2015. Hal ini diharapkan berdampak kepada peningkatan kualitas layanan sehingga berpengaruh kepada tingkat kepuasan satker di tahun 2020, Meningkatkan kualitas personal petugas layanan, dan Memaksimalkan ruang yang ada untuk memenuhi fasilitas layanan

3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah dan tingkat kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah.

TABEL 3.11
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi

SS 3: Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	101,94
3b-N	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	Indeks 4,5	Indeks 5	111,11

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan menggunakan aplikasi E-Rekon.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengukuran realisasi IKU tersebut untuk tahun 2019 menggunakan formula sebagai berikut:

Formula:

$$\text{Capaian IKU} = 50\% \left(\frac{a}{c} \right) + 50\% \left(\frac{b}{c} \right)$$

Keterangan :
 a : Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
 b : Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen.
 c : Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

Target tahun 2019

Periode pelaporan (*trajectory*) IKU tersebut adalah triwulanan, perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan). Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah sebesar 98,1%.

Realisasi tahun 2019

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2019 adalah 100% yang diperoleh dari rata-rata perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) selama triwulan I s.d triwulan IV 2019.

TABEL 3.12

Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	Maximize / Average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Capaian	101,94%	101,94%	101,94%	101,94%	101,94%	101,94%	101,94%	

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.12, dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal, menghasilkan angka capaian 100% di tiap triwulannya sehingga rata-rata capaian IKU tahun 2019 adalah 100%.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun sebelumnya

Perbandingan IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.22.

TABEL 3.13

Perbandingan Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal tahun 2019

Target/Realisasi	2019	2018
Target	98,1%	98%
Realisasi	100%	100%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13, terdapat kesamaan realisasi capaian IKU antara tahun 2018 dengan tahun 2019 dimana mencapai realisasi 100%.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Perhitungan capaian IKU periode triwulan IV Tahun 2019 dilakukan berdasarkan data pelaksanaan Rekon bulan September s.d. November 2019. Perhitungan capaian triwulan IV 2019 atas IKU Persentase Rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal dihitung hanya berdasarkan pelaksanaan rekonsiliasi bulan September s.d. November dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Satker yang melakukan upload data ke E-Rekon adalah 111 Satker
- Jumlah satker dengan nilai suspen tidak melebihi ambang batas suspen adalah 111 Satker
- Jumlah satker aktif pada periode berkenan adalah 111 Satker.

Permasalahan yang pernah terjadi adalah :

1. Satker tidak mengikuti perkembangan jadwal periode rekon, karena untuk bulan tertentu seringkali berubah menyesuaikan dengan kondisi saat itu.
2. Satker lambat merespon perbedaan/selisih sehingga terjadi transaksi dalam konformasi (TDK)
3. Kurangnya pemahaman satker terhadap mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 adalah :

1. Menginformasikan jadwal buka tutup E-rekon ke pada satker melalui website KPPN Painan dan grup Whatsapp "Diskusi KPPN Painan" apabila pelaksanaan E-Rekon

pada tahun 2019 sudah dimulai sehingga dipastikan seluruh satker terinformasikan perihal jadwal E-Rekon.

2. Konsultasi ke Hai DJPb terkait permasalahan rekon yang penanganannya tidak dapat dilakukan oleh Vera-Ki, maupun CSO KPPN
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Sakter yang masih belum melakukan upload data E-Rekon dengan melakukan komunikasi secara aktif serta kunjungan ke Satker yang bersangkutan.
4. Melakukan pembinaan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke Satker yang rekonsiliasinya bermasalah.

Adapun yang menjadi rekomendasi rencana aksi pada periode selanjutnya adalah Pendampingan secara rutin terhadap Satker yang memiliki permasalahan pada saat upload e-rekon dengan bimbingan teknis atau kunjungan secara langsung ke Satker.

3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah** diatur sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja. Rekening pemerintah adalah rekening milik K/L/satuan kerja yang dibuka pada bank umum/kantor pos dalam rangka pengelolaan keuangan K/L/satuan kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, pengelolaan rekening milik K/L/Satuan kerja terdiri dari:

1. Pembukaan rekening pada bank umum/Kantor pos
2. Pengoperasian rekening
3. Penutupan rekening
4. Pengendalian rekening

Sehubungan kewenangan pengelolaan rekening tersebut, K/L/satuan kerja berkewajiban kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah (KPPN) sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya
2. Menyampaikan laporan pembukaan rekening
3. Melaporkan seluruh saldo rekening setiap bulan
4. Menyampaikan laporan penutupan rekening

Sebagai Kuasa BUN Daerah, KPPN berwenang melakukan pengendalian atas pengelolaan seluruh rekening milik K/L/Satuan Kerja di lingkungan wilayah kerjanya.

Target tahun 2019

Periode pelaporan (*trajectory*) IKU tersebut adalah triwulanan, perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah sebesar indeks 4,5.

Realisasi tahun 2019

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2019 menghasilkan angka capaian Indeks 5. hal ini disebabkan oleh lebih dari 95% satker lingkup KPPN Painan patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya.

TABEL 3.14
Capaian IKU Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	Indeks 4,5	Indeks 4,5	Indeks 4,5	Indeks 4,5	Indeks 4,5	Indeks 4,5	Indeks 4,5	Maximize/ Average
Realisasi	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	
Nilai Capaian	111,11 %	111,11 %	111,11 %	111,11 %	111,11 %	111,11%	111,11%	

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.14, dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah, menghasilkan angka capaian indeks 5 di tiap triwulannya, sehingga rata rata capaian IKU tahun 2019 atas IKU Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah adalah menghasilkan angka capaian indeks 5.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun sebelumnya

Perbandingan IKU Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.16.

TABEL 3.15
Perbandingan Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal tahun 2018

Target/Realisasi	2019	2018
Target	Indeks 4,5	Indeks 4,25
Realisasi	Indeks 5	Indeks 5

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Sampai dengan periode triwulan IV tahun 2019 terdapat 57 rekening yang dikelola oleh satker mitra KPPN Painan, yang terdiri dari 35 rekening bendahara pengeluaran (BPG), 2 rekening bendahara penerimaan (BPN), dan 7 rekening pemerintah lainnya (RPL) serta 13 rekening bendahara pengeluaran pembantu (BPP). Pengelolaan rekening telah dialihkan melalui aplikasi SPRINT yang beralamat <http://sprint.kemenkeu.go.id>. Pengubahan yang terjadi ialah Satker secara mandiri melakukan permintaan pembukaan, pelaporan saldo, dan penutupan rekening, sedangkan KPPN hanya berperan sebagai approval saja. Dengan pengubahan ini diharapkan Satker akan lebih tertib dalam pengelolaan rekening pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Painan adalah KPPN Painan telah melaksanakan sosialisasi penggunaan Aplikasi SPRINT kepada Satker. Sosialisasi diselenggarakan dengan kerja sama Seksi Bank dan Seksi Vera-KI mengingat pada aplikasi SPRINT terdapat dua kegunaan yang diproses oleh kedua seksi tersebut yaitu pengelolaan rekening dan penerimaan LPJ Bendahara.

Rekomendasi rencana aksi KPPN Painan adalah :

1. Lebih aktif berkomunikasi dengan satker melalui Grup Whatsapp agar semua satker dapat mengetahui *problem solving* atas permasalahan yang ada
2. Mengawasi pelaksanaan pelaporan penutupan rekening untuk Satker yang telah likudasi di tahun 2019.
3. Lebih aktif berkomunikasi dengan satker baik melalui Grup Whatsapp atau bimbingan secara langsung ke satker agar semua satker dapat mengetahui *problem solving* atas permasalahan rekening pemerintah.
4. Mengawasi dalam pelaksanaan pembukaan rekening

4. Sasaran Strategis 4: Pemenuhan layanan unggulan yang prima

Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

TABEL 3.16
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pemenuhan layanan unggulan yang prima

SS 4: Pemenuhan layanan unggulan yang prima

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,72%	100,32

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut: a. Jenis SPM yang masuk adalah

UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji. b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat. c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR. d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100 e. Data supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM f. Tidak dalam keadaan force majeure, seperti tidak berfungsinya UPS ketika jaringan listrik mati dan operator SPAN sakit secara tiba-tiba sehingga tidak sempat ditunjuk petugas pengganti.

Adapun yang menjadi formula perhitungan IKU Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D adalah :

Formula:	
\sum SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	X 100%

\sum SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN	

Target tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Tahun 2019 adalah 99,40% dengan periode pelaporan triwulanan. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Realisasi tahun 2019

Realisasi IKU Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D pada tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.17.

TABEL 3.17

Realisasi IKU Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D Pada tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	99,36 %	99,50 %	99,43 %	100%	99,62 %	100%	99,72%
Nilai Capaian	99,96	100,10	100,03	100,6	100,22	100,6	100,32

Dengan demikian, realisasi IKU tersebut telah memenuhi target pada tahun 2019, yaitu dengan capaian 99,72% dari target 99,40%.

TABEL 3.18

Perbandingan Realisasi dan Target IKU Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D Pada tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	99,36 %	99,50 %	99,43 %	100%	99,62 %	100%	99,72%	
Nilai Capaian	99,96	100,10	100,03	100,6	100,22	100,6	100,32	

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2019 dengan tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel 3.19.

TABEL 3.19

Perbandingan Capaian IKU Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D Pada tahun 2018 dan 2019

Target/Realisasi	2019	2018	Ket
Target	99,40%	99%	Secara keseluruhan Terjadi kenaikan capaian pada 2019
Realisasi	99,72%	99,99%	

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Target sebesar 99.40% cukup tinggi sehingga memerlukan adanya monitoring yang baik. Selama Triwulan IV tahun 2019. Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai kriteria oleh KPPN adalah 833 SP2D, dengan rincian Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai kriteria tepat waktu sebanyak 833 . Sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D pada triwulan IV secara tepat waktu adalah 100%.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 diantaranya :

1. Koordinasi antara Seksi Bank dan Seksi PDMS setiap akan melakukan upload SPM.
2. Melakukan Rapat antara Seksi Bank dan Seksi PDMS membahas SP2D yang diterbitkan lebih dari 1 Jam.
3. Melakukan pemindahan PC SPAN FO Validator agar berdekatan dengan user SPAN pada Seksi PDMS dan Bank untuk memudahkan koordinasi antara user SPAN.
4. Melakukan upload SPM bertahap dengan jumlah tertentu untuk memudahkan pemrosesan SPM.

Rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah :

1. Peningkatan kehati-hatian oleh Validator pada saat mengunggah SPM agar melihat kesiapan dari user SPAN pada Seksi PDMS dan Bank.
2. Meningkatkan Koordinasi antara Seksi PDMS dan Seksi Bank dengan membuat *checklist* penyelesaian SP2D.

5. Sasaran Strategis 5: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal dan akurat adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara lengkap dan valid, penyimpanan dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi dan tertib, serta penyelesaian laporan penatausahaan transaksi keuangan secara tepat waktu.

Andal dan Akurat

TABEL 3.20
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kas yang Pruden dan Optimal

SS 5: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-CP	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%	100%	111,11%
5b-N	Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	99%	99,96%	100,97%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker

KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada Kepala KPPN.

Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 10%.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker.

Persentase akurasi rencana penarikan dana satker diformulasikan sebagai berikut:

Formula:
100% - (Rata - Rata Deviasi RPD Satker per periode)
Keterangan :
Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:
a) Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
b) Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
c) Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
d) Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
e) Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM

Target tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 90%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Realisasi tahun 2019

Realisasi IKU akurasi rencana penarikan dana satker pada tahun 2019 adalah 100% pada triwulan I, 100% pada triwulan II, 100% pada triwulan III, dan 100% pada triwulan IV tahun 2019. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.21

Realisasi capaian IKU Persentase akurasi rencana penarikan dana satker pada tahun 2018

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dengan demikian capaian IKU Persentase akurasi rencana penarikan dana satker dapat ditunjukkan pada Tabel 3.22.

TABEL 3.22

Capaian IKU Persentase akurasi rencana penarikan dana satker pada tahun 2019

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Maximize / Average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2018 dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2018 dengan tahun capaian tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.23.

TABEL 3.23

Perbandingan Capaian IKU Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 2018 dan 2019

Target/Realisasi	2019	2018	Ket
Target	90%	87%	Untuk dapat dibandingkan perlu diketahui nilai Deviasi (1 – akurasi)
Realisasi	100%	99,77%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.24, realisasi IKU tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 0,23.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Capaian IKU persentase akurasi rencana penarikan dana satker pada triwulan IV tahun 2019 dihitung berdasarkan data deviasi pada bulan Oktober s.d. Desember 2019. Tidak dimungkinkan adanya pengajuan SPM tanpa renkas apabila menginginkan target akurasi rencana penarikan dana satker sebesar 90% dapat tercapai. Pada triwulan IV tahun 2019, terdapat 6 renkas yang disampaikan oleh Satker dengan rincian 3 renkas diajukan oleh Satker Polres Pesisir Selatan (640701) untuk keperluan gaji induk bulanan, dan 3 renkas diajukan oleh Satker KPPN Painan Pengelola Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa (403587) untuk keperluan penyaluran Dak Fisik dan dana desa.

Terjadi deviasi yang tinggi apabila ada SPM yang disampaikan tanpa renkas atau tidak sesuai jumlahnya dengan renkas yang telah dikirimkan.

Tidak banyaknya SPM satker yang nilainya melebihi 1 milyar menyebabkan tingginya resiko rendahnya akurasi rencana penarikan dana apabila terjadi pengajuan SPM yang tidak sesuai dengan renkasnya

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 adalah :

1. Setelah berlakunya PMK Nomor 197/PMK.05/2018 ambang batas renkas telah dinaikkan menjadi Rp 1 miliar sehingga memudahkan KPPN dalam melakukan identifikasi terhadap Satker yang akan mengajukan SPM dengan

nilai di atas Rp 1 miliar. Pembinaan, dan pemantauan berfokus kepada Satker-Satker tersebut sehingga dipastikan tidak ada renkas yang tidak ada realisasinya.

2. Melakukan identifikasi terhadap belanja Satker yang melebihi Rp1 Miliar untuk mengetahui potensi penyampaian renkas.
3. Menghimbau kepada Satker untuk menyampaikan renkas sebelum terdapat pencairan dana yang melebihi Rp1 Miliar per SPMnya.
4. Melakukan konfirmasi kepada Satker bahwa renkas yang disampaikan telah sesuai dengan SPM yang akan diajukan kemudian.
5. Menghimbau kepada Satker untuk menyampaikan SPM yang memiliki renkas sebelum pukul 12.00 WIB agar SP2Dnya dapat terbit pada hari berkenaan.

Rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah :

1. Menghimbau kepada Satker agar penyampaian renkas dipastikan telah tepat waktu dan tepat jumlah.
2. Menghimbau kepada Satker untuk memastikan bahwa renkas yang disampaikan telah memenuhi persyaratan renkas

5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank/Pos Operasional. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

Persentase akurasi penyaluran dana SP2D diformulasikan sebagai berikut:

Formula :
$\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh Bank/Pos Operasional}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$

Target tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 99%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Realisasi tahun 2019

Realisasi IKU Persentase akurasi penyaluran dana SP2D pada tahun 2019 adalah 99,95% pada triwulan I, 99,99% pada triwulan II, 99,96% pada triwulan III, dan 99,93% pada triwulan IV tahun 2019.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.24

Realisasi capaian IKU Persentase akurasi penyaluran dana SP2D pada tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	99,95 %	99,99%	99,97%	99,96%	99,97%	99,93%	99,96%

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Dengan demikian capaian IKU Persentase akurasi penyaluran dana SP2D dapat ditunjukkan pada Tabel 3.25.

TABEL 3.25

Capaian IKU Persentase akurasi penyaluran dana SP2D pada tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	<i>Maximize / Average</i>
Realisasi	99,95 %	99,99%	99,97%	99,96%	99,97%	99,93%	99,96%	
Capaian	100,95	101	100,98	100,97	100,98	100,94	100,97	

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Upaya meminimalisir retur telah dilaksanakan seksi PDMS melalui sarana konsultasi secara langsung baik itu oleh FO PDMS maupun petugas CSO KPPN. Petugas FO dan CSO KPPN secara aktif telah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Satker perihal langkah-langkah untuk meminimalisir retur salah satunya adalah memastikan keaktifan rekening saat sebelum menyampaikan SPM ke KPPN.

Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN diperoleh total penerima selama triwulan IV tahun 2019 adalah 15.319 penerima dengan jumlah retur sebanyak 11 penerima. Jumlah penerima yang yang tidak mengalami retur dibandingkan dengan daftar seluruh penerima SP2D menghasilkan angka capaian 99,96%.

Permasalahan :

1. Satker masih belum memahami hal-hal apa saja penyebab retur serta kurangnya ketelitian dalam pencantuman nomor rekening pada SPM, seharusnya perekaman nomor rekening sesuai dengan buku rekening pegawai/informasi rekening supplier.
2. Pada bulan Desember 2019, terdapat penyaluran dana untuk tunjangan guru non PNS pada Kabupaten Pesisir Selatan dimana dari rekening yang ada masih terdapat rekening yang salah dan pasif.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah Himbuan dan edukasi kepada Satker perihal langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka meminimalisir retur dengan cara :

1. Pengecekan secara berlapis terkait perekaman nomor dan nama pemiliki rekening pada penerima SPM.
2. Memastikan bahwa rekening penerima dalam kondisi aktif pada saat diajukan ke KPPN

Rekomendasi rencana aksi : Memberikan bimbingan dan himbuan kepada satker perihal langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka meminimalisir retur melalui petugas FO KPPN dan CSO KPPN.

6. Sasaran Strategis 6:

Manajemen Satker yang Berkesinambungan

Dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja pada tahap Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), diperlukan suatu strategi manajemen satker secara berkesinambungan.

Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi Customer service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan.

Manajemen satker dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan di masing-masing unit.

TABEL 3.26
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Manajemen Satker yang berkesinambungan

SS 6: Manajemen Satker yang berkesinambungan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-N	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	86	88,75	103,20%
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	95%	100%	105,26%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

6a-N

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan

untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi diformulasikan sebagai berikut:

Formula:
Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi
$0 < x \leq 20$ = tidak efektif
$21 < x \leq 40$ = kurang efektif
$41 < x \leq 60$ = cukup efektif
$61 < x \leq 80$ = efektif
$81 < x \leq 100$ = sangat efektif

Target tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 86. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Realisasi tahun 2019

Realisasi IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2019 adalah indeks 91,4 pada semester I dan semester II 86,11, sampai dengan akhir tahun 2019 adalah menghasilkan nilai 88,75. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.27

Realisasi capaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	N/A	91,4	91,4	N/A	91,4	86,11	88,75

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Dengan demikian capaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi dapat ditunjukkan pada Tabel 3.28.

TABEL 3.28

Capaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	86	86	-	86	86	86	Maximize/ Average
Realisasi	N/A	91,4	91,4	N/A	91,4	86,11	88,75	
Capaian	N/A	106,28	106,28	N/A	106,28	100,13	103,20	

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Permasalahan utama dalam ketercapaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2019 adalah Ruang aula KPPN sangat terbatas sebagai tempat penyelenggaraan sosialisasi / bimtek. Jika kegiatan sosialisasi / bimtek harus dihadiri perwakilan 2 orang per satker, sosialisasi terpaksa dilaksanakan dengan

jadwal dua shift yakni pagi dan siang sehingga mengurangi tingkat kenyamanan peserta sosialisasi / bimtek.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

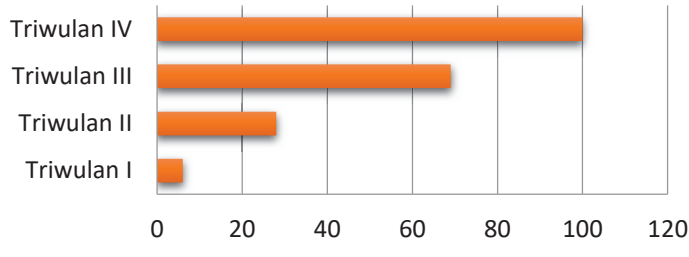
1. Peningkatan kualitas narasumber dan materi dengan cara mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis yang ada.
2. Peningkatan kesiapan panitia penyelenggara kegiatan dengan cara melaksanakan rapat sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Secara rutin melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pembelajaran/masukan untuk kegiatan selanjutnya.
4. Pembuatan materi yang menarik dan mudah dipahami.
5. Penentuan peserta sosialisasi/bimtek yang tepat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi dan bimtek
6. Penyediaan sarana pendukung sosialisasi/bimtek untuk meningkatkan kenyamanan peserta selama pelaksanaan sosialisasi/bimtek

Rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah Peningkatan kesiapan penyelenggaraan sosialisasi dengan menginformasikan kepada seluruh panitia/pegawai KPPN Painan beberapa hari sebelum pelaksanaan sosialisasi/ bimtek, sehingga kekurangan yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dapat segera diatasi.

6b-CP

Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

Capaian Selama Tahun 2019



IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2019 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup

Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkungnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI. Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2019, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :

- a. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2019 secara tepat waktu.
- b. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2019.

Formula :	
Capaian Kegiatan Implementasi SAKTI Tahun 2019 :	
Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2019	X Proporsi Tahapan X 100%
Total jumlah satker yang ditetapkan mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2019	

Target tahun
2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 95%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value.

Realisasi
tahun 2019

Realisasi IKU Persentase tingkat implementasi SAKTI mencapai 6% pada triwulan I, 28% pada triwulan II, 69% pada triwulan III, dan 100% pada triwulan IV.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.29

Realisasi capaian IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	6%	28%	28%	69%	69%	100%	100%

Perbandingan
realisasi dan
target tahun
2019

Dengan demikian capaian IKU perbandingan target dan realisasi Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI dapat ditunjukkan pada Tabel 3.30.

TABEL 3.30

Capaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2019

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	6%	25%	25%	65%	65%	95%	95%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	6%	28%	28%	69%	69%	100%	100%	
Capaian	100	112	112	106,15	106,15	105,26	105,26	

Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan

Pengukuran IKU Persentase Tingkat Implementasi SAKTI untuk KPPN Painan mengacu kepada setiap kegiatan tahapan implementasi SAKTI yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap I untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK.
2. FGD/Sosialisasi SAKTI tahap I untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK.
3. FGD/Sosialisasi SAKTI tahap II untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK.
4. Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap II untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK.
5. Training modul admin dan penganggaran SAKTI berbasis web.

6. Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap III untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK.
7. Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap IV untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK.
8. Pendampingan SAKTI berbasis web untuk modul admin dan penganggaran.

Setiap tahapan diatas telah dilaksanakn oleh KPPN Painan selama tahun 2019 sehingga dapat memperoleh capaian IKU 100%.

Rekomendasi Rencana Aksi yang akan dilakukan KPPN Painan pada tahun 2020 adalah Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan ndan Menentukan PIC untuk setiap kegiatan yang disusun agar berjalan dengan lancar dan terarah adalah Melakukan percepatan implementasi aplikasi SAKTI untuk Satker yang menjadi piloting pada tahap berikutnya. Percepatan tersebut berupa pelaksanaan FGD, flyer dan sosialisasi.

7. Sasaran Strategis 7:

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu adalah : serangkaian kegiatan untuk melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan KPPN dengan melakukan rekonsiliasi baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan laporan pemerintah pusat tingkat KPPN secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu sesuai ketentuan. Yang menjadi IKU pada sasaran strategis Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu adalah (1) Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu dan (2) Persentase exception report laporan Keuangan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.31

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

SS 7: Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	97,5%	99,78%	102,33%
7b-N	Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	75	97,35	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu

LPJ Bendahara adalah Laporan yang disusun oleh Bendahara melalui Modul SILABI atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan, pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/Satker, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2019 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ bulan Desember 2018, bulan Januari dan Februari tahun 2019. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2019 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ bulan Maret, April dan Mei tahun 2019 dan seterusnya.

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu diformulasikan sebagai berikut:

Formula:
$\frac{\sum \text{Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan Modul SILABI secara andal dan tepat waktu}}{\sum \text{Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ}} \times 100 \%$

Target IKU Tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 97,5%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Realisasi IKU Tahun 2019

Realisasi IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu pada tahun 2019 adalah 99,12% pada triwulan I, 100% pada triwulan II, 100% pada triwulan III dan 100% pada triwulan IV. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.32

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu pada tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	99,12%	100%	99,56%	100%	99,71%	100%	99,78

Dengan demikian, capaian IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.33.

TABEL 3.33

Capaian IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	Maximize/ Average
Realisasi	99,12%	100%	99,56%	100%	99,71%	100%	99,78	
Nilai Capaian	101,66	102,56	102,11	102,56	102,26	102,56	102,33	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada pada Tabel 3.34.

TABEL 3.34

Perbandingan capaian IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu

Target/ realisasi	2019	2018
Target KK	97,50%	97%
Realisasi	99,78%	99,78%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.34, realisasi IKU tersebut pada tahun 2019 s.d. 2018 masing-masing telah melampaui targetnya.

*Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan*

Yang menjadi ISU utama adalah Ada tenggang waktu yang cukup lama antara penyampaian ADK LPJ ke SPRINT dengan penyampaian hardcopy LPJ beserta kelengkapannya sehingga menyulitkan bagi KPPN untuk melakukan verifikasi terhadap LPJ berkenaan sehingga Akan menyebabkan proses approve terganggu, dan bahkan jika LPJ beserta kelengkapannya tidak diterima oleh KPPN berisiko untuk tidak disetujui dan KPPN akan menerbitkan Surat Peringatan Pengenaan Sanksi (SP2S) yang sudah pasti akan berimplikasi pada tidak optimalnya pencapaian target IKU Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN secara Andal dan Tepat Waktu.

Kurangnya pemahaman satker terhadap Perdirjen nomor 3/PB/2013 tentang pertanggungjawaban bendahara juga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban Bendahara Mitra kerja KPPN Painan.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 adalah KPPN Painan membuat inovasi dalam memberikan kemudahan bagi satker untuk menyampaikan softcopy LPJ beserta kelengkapan dokumennya melalui email yang sudah dibuat khusus sehingga KPPN dapat melakukan verifikasi dengan mudah dan cepat. Email ini sudah diberitahukan kepada satker mitra kerja KPPN Painan.

Adapun rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah :

1. Pembinaan secara intensif bagi satuan kerja yang mengalami masalah terkait LPJ bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran baik secara langsung melalui CSO maupun secara tidak langsung melalui grup *whatsapp* diskusi satker mitra KPPN Painan.
2. Memberikan edukasi ke satker mengenai PER-3/PNB/2013
3. Mengajak satker untuk mau mengirimkan LPJ sebelum awal bulan berikutnya agar masih tersedia waktu jika terdapat perbedaan data yang harus ditindaklanjuti.

7b-N 7b-N Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
3. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
4. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Penilaian Total Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah sebagai berikut

$$NKP\ DFDD = [0,10 (SYARAT) + 0,30 (SSPSPM) + 0,30 (MONEV) + 0,30 (LK-UAKPA)] \times 100$$

Target IKU Tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 75. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Realisasi IKU Tahun 2019

Adapun realisasi tahun 2019 tersebut didapatkan dengan dengan perhitungan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.35.

TABEL 3.35

Perhitungan IKU Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	95	96,63	95,82	99,14	96,92	98,63	97,35

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Nilai akhir IKU Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana ditunjukkan pada Tabel 3.35.

TABEL 3.36.

Capaian IKU IKU Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	Pol /KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Minimize/ Average
Realisasi	95	96.63	95,82	99,14	96,92	98,63	97,35	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.36, realisasi IKU tersebut melampaui targetnya pada tahun 2019 dengan nilai capaian 120 (maksimum).

*Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan*

KPPN Painan hanya memiliki 1 mitra penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saja. Dengan kondisi lokasi yang berdekatan antara KPPN dan BPKD Kabupaten Pesisir Selatan sangat memudahkan koordinasi dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Pemerintah Daerah Pesisir Selatan kooperatif dalam pemenuhan persyaratan penyaluran sehingga tidak pernah terlambat dalam melebihi batas waktu penyampaian dokumen DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN selaku penyalur selalu menyalurkan tepat waktu maksimal 7 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh KPPN.

Penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang merupakan kewajiban KPPN kepada Koordinator Dit PA juga disampaikan secara tepat waktu tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

Pada triwulan IV capaian nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa masih N/A karena nilai dari kantor pusat masih belum tersedia. Masih terdapat indikator penilaian yang dapat ditingkatkan yaitu : Indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DFDD

Akar masalah: Pemda belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DFDD secara tepat waktu.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 adalah :

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penyaluran Dana Desa tahap 1.
2. KPPN Painan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana desa yang sudah disalurkan triwulan I,II, III dan IV
3. KPPN Painan telah melaksanakan FGD Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa pada tanggal 07 Mei 2019

Rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah via *Whatsapp* maupun telepon.
2. Menyampaikan LK UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN tepat waktu.

8. Sasaran Strategis 8:

Learning and Growth Perspektif

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

TABEL 3.37
Capaian IKU pada Sasaran Strategis SDM yang kompetitif

SS 8: Learning and Growth Perspektif				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Nilai rata – rata hard competency pegawai	77	87,17	113,21%
8b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Coaching dan Counseling	65%	99,31%	120%
8c-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Literasi perbendaharaan	72	89,25	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

8a-N Nilai rata – rata hard competency pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Untuk Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai KPPN. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Nilai rata – rata hard competency pegawai diformulasikan sebagai berikut:

Formula:
$\frac{\text{Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai}}{\text{Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency}}$

Target IKU Tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 77. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Nilai diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi IKU Tahun 2019 - Nilai *hard competency*:

$$\frac{\text{jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai}}{\text{Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency}} \times 100\%$$

$$= \frac{610,2}{7} = 87,17$$

Realisasi IKU tersebut tahun 2019, yaitu sebesar 87,17 telah melebihi target yang telah ditetapkan (77) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.38.

TABEL 3.38

Capaian IKU Nilai rata – rata *hard competency* pegawai tahun 2019

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	77	77	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	-	-	-	-	-	87,17	87,17	
Capaian	-	-	-	-	-	113,21	113,21	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun sebelumnya

Realisasi tersebut tahun 2019 sebesar 87,17 menurun dibandingkan realisasi tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan target dan realisasinya pada Tabel 3.39. penurunan ini tidak signifikan dan masih mencapai target.

TABEL 3.39

Perbandingan Capaian IKU Nilai rata – rata *hard competency* pegawai tahun 2018 dan tahun 2019

Target/realisasi	2019	2018
Target KK	77	77
Realisasi	87,17	90,4

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.37, realisasi IKU tersebut pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing telah melampaui targetnya.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Upaya peningkatan nilai rata rata *hard competency* pegawai KPPN Painan telah dilaksanakan dalam bentuk (1) Dialog Kinerja Organisasi (2) *Morning Call* (3) *Sharing Session* internal (4) Gugus Kendali Mutu dan (5) Mutasi Internal Pegawai. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas *hard competency* pegawai.

Pada tahun 2019 telah diperoleh capaian IKU *Hard Competency* Pegawai KPPN Painan yakni dengan nilai rata rata 87,17 dimana pegawai yang wajib mengikuti tes *hard competency* sejumlah 7 orang. Perkembangan saat ini sudah ada kemajuan dari beberapa pegawai khususnya dalam kegiatan penyampaian satu informasi positif setiap hari Senin dan Kamis dalam kegiatan *morning call* rutin yang diselenggarakan KPPN Painan mulai pukul 07.30 s.d. 07.45 WIB.

Perkembangannya adalah, beberapa pegawai yang selama ini cenderung untuk tidak mau menyampaikan informasi positif, saat ini secara perlahan sudah lebih maksimal. Hal tersebut membuktikan adanya usaha dari masing masing pegawai untuk menambah wawasannya sehingga mampu menyampaikan satu informasi positif sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU Hard Competency tersebut, yaitu:

Telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah Dialog Kinerja Organisasi dan Individu, Penerapan Coaching dan Counseling yang selaras dengan penerapan salah satu IKU Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan, Morning call secara rutin hari Senin dan Kamis, GKM pengembangan kompetensi pegawai serta yang terbaru adalah mutasi internal pegawai KPPN Painan pada tanggal 02 Januari 2019 dan 30 Juni 2019.

Adapun yang menjadi rekomendasi rencana aksi adalah :

Transfer Knowledge secara berkesinambungan khususnya terhadap pegawai yang dimutasi internal, penjadwalan informasi positif dengan tema yang berkaitan dengan peningkatan hard competency seperti wawasan terkait Visi Misi, Indikator Kinerja Utama maupun SOP ataupun perkembangan terbaru terkait Ditjen Perbendaharaan. Selain itu masing-masing seksi dapat dijadwalkan pertemuan rutin bulanan untuk membahas tema terkini terkait tugas dan fungsinya.

8b-N

Persentase kualitas pelaksanaan coaching and counseling

IKU ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai, dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja pegawai. Pelaksanaan Coaching & Counseling antara lain:

- a. Proses Coaching & Counseling, yaitu proses coaching yang dilakukan dengan metode COMBAT atau GROW untuk memaksimalkan potensi coachee dalam menghadapi tantangan pekerjaan atau menyelesaikan target pekerjaan.
- b. Evaluasi Pasca Coaching & Counseling, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program coaching & counseling dapat diterapkan dan diimplementasikan di tempat kerja. Evaluasi/Feedback antara Coach-Coachee dan sebaliknya melalui online.

*Target IKU
Tahun 2019*

Catatan:

Guna memudahkan pelaksanaan coaching & counseling maka periode pelaporan IKU adalah triwulanan

Formula:

$$50 \% \text{ Nilai Ketepatan Waktu Pelaksanaan CnC} + 40 \% \text{ Nilai Evaluasi/ Feedback dari Coachee} + 10 \% \text{ Monitoring Action Plan}$$

Target Coach Mendapatkan Nilai Kualitas Pelaksanaan Coaching dan Counseling sebesar 60%

Realisasi IKU
Tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 65%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Perbandingan
realisasi dan
target tahun
2019

Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan coaching dan counseling pada tahun 2019 adalah 99,31%.

TABEL 3.40

Perhitungan IKU persentase kualitas pelaksanaan coaching dan counseling tahun 2018

Nilai & Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	99,6%	98,31%	98,95%	99,76%	99,22%	99,56%	99,31%

Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan

TABEL 3.41

Perhitungan IKU persentase kualitas pelaksanaan coaching dan counseling tahun 2019

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	Pol /KP
Target	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	Maximize/ Average
Realisasi	99,6%	98,31%	98,95%	99,76%	99,22%	99,56	99,31	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU tersebut telah mencapai realisasi 99,31% dari target 65%.

Pelaksanaan *Coaching* dan *Counseling* di KPPN A2 tahun 2019 ditargetkan minimal 7.5 Jam setiap triwulannya dengan penyelesaian target minimal yakni hari terakhir triwulan berkenan.

Untuk meningkatkan nilai persentasi kualitas pelaksanaan *Coaching* dan *Counseling* perlu dipenuhinya realisasi jumlah jam kegiatan.

Akar masalah: Jumlah pegawai yang terbatas sehingga pelaksanaan *coaching* bisa berulang kepada pegawai yang sama pada setiap periodenya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu *Coaching* dan *Counseling* dengan tipe *development*, tipe performance yang dilakukan setiap triwulannya.

Adapun yang menjadi rekomendasi rencana aksi adalah Pelaksanaan *Coaching* dan *Counseling* periode selanjutnya akan diselesaikan satu bulan sebelum batas waktu dengan berfokus pada peningkatan kemampuan coachee.

IKU ini diwujudkan untuk mendukung implementasi Program Perbendaharaan Menulis. Program Perbendaharaan Menulis merupakan program untuk meningkatkan

Indeks
Kualitas
Pelaksanaan
Literasi
Perbendaharaan

8c-N

kapasitas literasi para pejabat/pegawai DJPb serta upaya meningkatkan branding image DJPb.

Implementasi Program Perbendaharaan Menulis mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Artikel dan Buku Kanwil pada Program Perbendaharaan Menulis.

Implementasi IKU ini berfokus terhadap penyusunan karya tulis/artikel oleh pejabat eselon III dan IV, minimal 1 (satu) output karya tulis/artikel dalam periode triwulanan. Pengukuran capaian IKU ini dirumuskan berdasarkan hasil penilaian terhadap karya tulis/artikel oleh Tim Redaksi yang dibentuk di tingkat Kantor Wilayah DJPb maupun tingkat Kantor Pusat DJPb, dengan kriteria penilaian sebagaimana surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018. Penilaian dilakukan oleh Tim Redaksi secara berjenjang sebagai berikut:

*Target IKU
Tahun 2019*

*Realisasi IKU
Tahun 2019*

- Karya tulis pejabat eselon III Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kantor Pusat DJPb.

- Karya tulis pejabat eselon IV Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kanwil DJPb.

Formula: Hasil Penilaian oleh Tim Redaksi Kantor Pusat DJPb

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 72. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

*Perbandingan
realisasi dan
target tahun
2018*

Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan coaching dan counseling pada tahun 2019 adalah 89,25

*Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan*

TABEL 3.42

Perhitungan IKU Indeks kulaitas pelaksanaan literasi

Nilai & Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	86	87	86,5	90	87,67	94	89,25

TABEL 3.43

Perhitungan IKU Indeks kulaitas pelaksanaan literasi

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	Pol /KP
Target	72	72	72	72	72	72	72	Maximize/ Average
Realisasi	86	87	86,5	90	87,67	94	89,25	
Capaian	119,44	120	120	120	120	120	120	

IKU tersebut telah mencapai realisasi 89,25 dari target 72. IKU.

IKU ini diwujudkan untuk mendukung implementasi Program Perbendaharaan Menulis. Program Perbendaharaan Menulis merupakan program untuk meningkatkan kapasitas literasi para pejabat/pegawai DJPb serta upaya meningkatkan *branding image* DJPb.

Implementasi Program Perbendaharaan Menulis mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Artikel dan Buku Kanwil pada Program Perbendaharaan Menulis. Implementasi IKU ini berfokus terhadap penyusunan karya tulis/artikel oleh pejabat eselon III dan IV, minimal 1 (satu) output karya tulis/artikel dalam periode triwulanan. Pengukuran capaian IKU ini dirumuskan berdasarkan hasil penilaian terhadap karya tulis/artikel oleh Tim Redaksi Kantor Pusat DJPb.

Akar masalah: Pengetahuan dan pengalaman dalam teknik penulisan yang masih perlu ditingkatkan.

Tindakan yang dilaksanakan KPPN Painan adalah

1. Pengenalan terkait budaya literasi (membaca dan menulis) melalui kesempatan *morning call*. hal ini diperlukan karena untuk mewujudkan sebuah karya tulis diperlukan wawasan yang hanya dapat dibentuk dari pengalaman dan minat baca.
2. Pengenalan terkait budaya literasi (membaca dan menulis) melalui kesempatan *morning call*. hal ini diperlukan karena untuk mewujudkan sebuah karya tulis diperlukan wawasan yang hanya dapat dibentuk dari pengalaman dan minat baca.
3. Telah diusulkan kegiatan bimtek/workshop terkait penulisan dengan narasumber dapat berupa wartawan, dosen atau narasumber lain di bidang penulisan dalam usulan Rakorwil Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.
4. KPPN Painan telah melaksanakan Pelatihan teknis menulis artikel pada tanggal 27 Juni 2019

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan KPPN Painan adalah

1. Melibatkan Pejabat Eselon III dan eselon IV sebagai kontributor Website KPPN Painan.
2. Mengadakan kegiatan *One Week One Sentence* pada saat Do'a Bersama setiap hari Senin.

9. Sasaran Strategis 9:

Organisasi yang kondusif

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

TABEL 3.44
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi yang kondusif

SS 9: Organisasi sehat yang kondusif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-N	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	75	95,83	120
9b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83	86,98	104,80

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

9a-N Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang SKKI.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Laporan penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Laporan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
4. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan pengelolaan pengaduan (bobot: 10%)

Formula : Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah Ditjen Perbandaharaan

Target IKU Tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019* adalah 75. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir dalam periode bersangkutan).

*Realisasi IKU
Tahun 2019*

Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern pada tahun 2019 adalah 95,83.

TABEL 3.45

Perhitungan IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2019

Nilai & Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,83	95,83

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.46.

TABEL 3.46

Perbandingan target dan realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2019

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	75	75	Maximize / TLNV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,83	95,83	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Penilaian hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilakukan oleh Kanwil JPb Prov. Sumbar secara periodik setiap triwulan terhadap beberapa komponen pekerjaan, antara lain : 1. Laporan penerapan manajemen risiko; 2. Laporan pemantauan pengendalian intern; 3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai; serta 4. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan pengelolaan pengaduan dengan indikator penilaian antara lain : 1. ketepatan waktu penyampaian laporan; 2. kesesuaian dan kelengkapan laporan; dan 3. ketepatan format laporan. Untuk triwulan IV penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan internal di bulan Oktober s.d. Desember 2019. Sampai dengan bulan Desember semua laporan pelaksanaan tugas Kepatuhan internal telah dibuat sesuai dengan format yang berlaku dan lengkap, serta dikirimkan tepat waktu

Tindakan yang telah dilaksanakan : Setiap bulan telah dibuat laporan pengendalian internal, laporan pengaduan, dan laporan gratifikasi, dan per triwulan telah dibuat laporan pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan laporan pemantauan dan penanganan terhadap risiko KPPN Painan.

Rekomendasi rencana aksi periode selanjutnya : Internalisasi Peraturan KMK 940/2017 tentang pengendalian internal.

9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

1. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2019 (70%).
2. Nilai NKO Unit periode tahunan 2018 (30%).

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization diformulasikan sebagai berikut:

“Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan”

Target IKU Tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019* adalah 83. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir)*.

Realisasi IKU Tahun 2019

Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization pada tahun 2018 adalah 86,98.

TABEL 3.47

Perhitungan IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2019

Unsur Pemenuhan Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja	Nilai	Realisasi IKU s.d. Trw III
Pemenuhan Langkah Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja (bobot 60%)	85,54	86,98
NKO (bobot 40%)	108,42	

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.48.

TABEL 3.48

Perbandingan target dan realisasi IKU Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern tahun 2019

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	83	83	Take Last Known Value
Realisasi	-	-	-	-	-	86,98	86,98	
Capaian	-	-	-	-	-	104,80	104,80	

Capaian IKU tersebut tahun sebelumnya (2018) adalah 83,29 sedangkan pada tahun 2019 adalah 86,98. Terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2019 sebesar 8,24 poin. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 dan 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.49.

TABEL 3.49

Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern tahun 2018 dan tahun 2019

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y
Target 2019	-	-	-	-	-	-	83
Realisasi 2019	-	-	-	-	-	-	86,98
Target 2018	-	-	-	-	-	-	81
Realisasi 2018	-	-	-	-	-	-	83,29

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun sebelumnya

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Pengukuran nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO berdasarkan parameter (1) nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode s.d triwulan IV 2019 dengan bobot 70% dan (2) Nilai NKO unit tahun 2018 dengan bobot 30%

Akar masalah : Setiap kegiatan yang menjadi bagian dalam matriks pengelolaan kinerja belum terdokumentasi dengan baik yang berupa nota dinas/undangan, daftar hadir, notulen,dan dokumentasi foto.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

1. Melaksanakan setiap unsur pengelolaan kinerja yang terdapat didalam matrik Laporan SFO sesuai jadwal dan dibuktikan kelengkapannya melalui penyampaian Laporan Langkah Langkah Peningkatan Kualitas Kinerja Triwulanan (Laporan SFO).
2. Menyampaikan Laporan SFO sesuai format dan jadwal yang telah ditentukan
3. membuat terobosan berupa penyediaan kalender pengelolaan kinerja KPPN Painan tahun 2018 yang memuat rencana kegiatan pengelolaan kinerja selama tahun 2018.Rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya : Membuat jadwal / kalender kegiatan pengelolaan kinerja tahun 2018 dengan mengacu kepada matriks Laporan SFO yang telah ada maupun aturan terkait pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Rekomendasi Rencana Aksi yang dilakukan KPPN Painann adalah Secara berkelanjutan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan pengelolaan kinerja selama tahun 2020 yang telah dituangkan di kalender pengelolaan kinerja KPPN Painan 2020 dan berfokus pada kelengkapan dokumen pendukung kegiatan.

10. Sasaran Strategis 10:

Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit.

Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

TABEL 3.50
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal

SS 10: Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
10a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	103,69%	112,71

10a-N Persentase pengelolaan BMN yang Optimal

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jenis BMN peralatan dan mesin pada KPPN sebagai acuan standarisasi adalah sebanyak 12 (dua belas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian.

Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016.

Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, Setditjen Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan mesin pada masing-masing unit secara periodik.

Atas penyampain data BMN peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen

Perbendaharaan c.q. Bagian Umum melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$80\% \times \frac{\text{Jumlah jenis BMN peralatan dan mesin yang tersedia}}{\text{Jumlah jenis BMN peralatan dan mesin sesuai SE-32 (12)}} + 20\% \times \frac{\text{Jumlah BMN peralatan dan mesin yang memenuhi spesifikasi SE-32}}{\text{Jumlah BMN peralatan dan mesin yang harus terpenuhi sesuai Se-32}}$$

*Target IKU
Tahun 2019*

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 92. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

*Perbandingan
realisasi dan
target tahun
2019*

Perbandingan realisasi dan target IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar dapat ditunjukkan pada Tabel 3.51.

TABEL 3.51

Perbandingan realisasi dan target tahun 2018

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-18	Pol /KP
Target	-	70%	70%	-	70%	92%	92%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	N/A	93,92%	93,92%	N/A	93,92%	103,69	103,69	
Capaian	N/A	120	120	N/A	120	112,71	112,71	

TABEL 3.52

Perbandingan realisasi dan target tahun 2018 dan tahun 2019

*Perbandingan
Realisasi IKU
tahun 2019 dan
tahun
sebelumnya*

Rincian IKU	Target	Capaian
Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN (2018)	91%	101,38 %
Persentase pemenuhan BMN sesuai standar (2019)	92%	103,69 %

Perbandingan Target dan Realisasi antara IKU pada tahun 2019 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.52. Terjadi kenaikan tingkat capaian pada tahun 2019 sebesar 2,31 poin.

*Isu,
permasalahan,
tindakan, dan
action plan*

Target IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar pada semester I tahun 2019 adalah 70%, sedangkan pada semester II targetnya adalah 92%. Pada semester II, IKU Persentase Pemenuhan BMN sesuai standar telah disampaikan oleh Kanpus DJPb melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3/PB.1/2020 tanggal 31 Desember 2019. KPPN Painan mendapat nilai 103,69%.

Secara umum sebanyak 12 BMN yang menjadi acuan standardisasi telah tersedia seluruhnya di KPPN Painan. Permasalahannya adalah masih terdapat beberapa BMN yang spesifikasinya belum sesuai dengan yang dicantumkan di SE-32/PB/2016.

IKU Persentase Pengelolaan BMN Tahun ini adalah gabungan antara pemenuhan BMN sesuai standar dan pengisian rincian data pada master aset SIMAN. Pada Triwulan II Tahun 2019 pemenuhan BMN sesuai standar mendapat nilai 112,30 sedangkan pengisian rincian data pada master aset SIMAN sebesar 66,34. Untuk

meningkatkan nilai KPPN Painan perlu melakukan perbaikan data pada master aset SIMAN.

Akar Masalah: Rincian data pada master aset SIMAN masih belum lengkap .

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 adalah :

1. Telah dibentuk Tim Sensus BMN Tahun 2019 pada KPPN Painan KEP-30/WPB.03/KP.06/2019 tanggal 22 Februari 2019.
2. Melakukan inventarisasi peralatan dan mesin yang masih efisien untuk digunakan dan melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin yang ada

Rekomendasi Rencana Aksi untuk periode selanjutnya adalah : Pada tahun 2020, KPPN Painan akan berfokus pada perawatan Sarana dan Prasarana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam pedoman mutu SMM ISO 9001 : 2015 mengingat capaian BMN standar telah di atas 100% pada tahun 2019.

11. Sasaran Strategis 11:

Pengelolaan anggaran yang optimal

TABEL 3.53
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan anggaran yang optimal

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA

SS 10: Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	98,86%	104,06

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

11a-CP

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

- 1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena

perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).

2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.

3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).

4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).

5) Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.

6) Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.

7) Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.

8) Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

9) Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN.

10) Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

11) Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.

12) Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).

13) Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.

14) Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Perhitungan IKU menggunakan formula sebagai berikut:

Formula:

$$\text{Realisasi IKU} = [(\% \text{ capaian keluaran} \times 30\%) + (\% \text{ efisiensi} \times 15\%) + (\% \text{ konsistensi} \times 10\%) + (\% \text{ penyerapan anggaran atas pagu netto} \times 15\%)] + [(\% \text{ penyelesaian tagihan} \times 4\%) + (\% \text{ penyampaian data kontrak} \times 3\%) + (\% \text{ pengelolaan UP} \times 4\%) + (\% \text{ perencanaan kas} \times 2\%) + (\% \text{ penyampaian LPJ} \times 2\%) + (\% \text{ pengembalian SPM} \times 3\%) + (\% \text{ retur SP2D} \times 3\%) + (\% \text{ revisi DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ pagu minus} \times 2\%) + (\% \text{ dispensasi SPM} \times 2\%)]$$

No.	Komponen Pengukuran		Bobot	
Komponen Hasil				
1.	Capaian Keluaran	x	30%	70%
2.	Efisiensi	x	15%	
3.	Konsistensi	x	10%	
4.	Penyerapan anggaran atas pagu netto	x	15%	
Komponen Proses				
5.	Penyelesaian tagihan	x	4%	30%
6.	Penyempamaan data kontrak	x	3%	
7.	Pengelolaan UP	x	4%	
8.	Perencanaan Kas	x	2%	
9.	Penyampaian LPJ	x	2%	
10.	Pengembalian SPM	x	3%	
11.	Retur SP2D	x	3%	
12.	Revisi DIPA	x	5%	
13.	Pagu Minus	x	2%	
14.	Dispensasi SPM	x	2%	

Target IKU Tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2019 adalah 95%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Average (realisasi yang digunakan adalah nilai rata-rata)*.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Perbandingan realisasi dan target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN dapat ditunjukkan pada Tabel 3.54.

TABEL 3.54
Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	Pol /KP
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Maximize / Average
Realisasi	98,77 %	98,41%	98.59%	98,71%	98,63%	99,55	98,86	
Capaian	103,97	103,59	103.77	103,91	103,82	104,79	104,06	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun sebelumnya

TABEL 3.55

Perbandingan realisasi dan target tahun 2018 dan tahun 2019

Rincian IKU	Target	Capaian
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN (2018)	95%	96,69%
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN (2019)	95%	98,86%

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Namun masih terdapat indikator yang memberikan kontribusi negatif terhadap kualitas PA, yaitu Akurasi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA.

Akar permasalahan Permasalahan yang terjadi adalah Pelaksanaan kegiatan terjadi keterlambatan dan belanja barang untuk keperluan operasional tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 :

KPPN Painan berfokus pada kegiatan yang dapat dilakukan seperti:

1. Percepatan realisasi belanja modal
2. Penyelenggaraan Sosialisasi, monev, kunjungan ke Satker dan koordinasi dengan mitra kerja KPPN Painan.
3. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan berfokus pada pemenuhan capaian output, efisiensi dan penyerapan anggaran.

Rekomendasi rencana aksi :

1. Meminta kepada masing-masing kepala Seksi untuk menyusun kembali rencana kegiatan untuk mempercepat capaian keluaran riil.
2. Menjaga konsistensi penyerapan anggaran sesuai dengan halaman III DIPA.
3. Menjaga nilai IKPA agar dapat mencapai nilai maksimal pada masing-masing indikator.

Inisiatif Strategis KPPN
Painan tahun 2019

Inisiatif Strategis KPPN Painan tahun 2019 diperlukan untuk membantu pencapaian sasaran strategis SDM yang kompetitif dan organisasi yang kondusif. Terdapat lima Inisiatif Strategis Kepala KPPN Painan tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.56.

TABEL 3.56
Inisiatif Strategis Kepala KPPN Painan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Output / Outcome	Target Waktu Penyelesaian	Status	Keterangan
1.	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu	Program <i>intensive care</i> implementasi PMK Monev Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan PMK Kartu Kredit.	Sosialisasi dan bimtek	Semester I 2019	Selesai	Kegiatan yang telah dilaksanakan : - FGD Pelaksanaan Anggaran KL TA 2019 (tgl.23-01-2019) - Sosialisasi Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP dan Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019 (tgl. 04-04-2019) - Review Nilai IKPA Tahun 2019 (tgl. 02-05-2019) - Penandatanganan PKS KKP (tgl. 28-05-2019) - Sosialisasi <i>Kick Of KKP</i> (tgl. 25-06-2019) - Monev belanja ke satker
2	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal	Sensus BMN selain barang dalam KIB	Terbentuknya <i>master asset</i>	Semester II 2019	Selesai	1. Telah dibentuk TIM Sensus BMN Tahun 2019 pada KPPN Painan sesuai KEP-30/WPB.03/ KP.06/2019. 2. Melakukan pendataan pemetaan lokasi dan ruangan; a. Membuat denah, sketsa atau peta lokasi DBR dan DBL b. Menyusun/membuat kodefikasi atau denah DBR dan DBL 3. Melakukan pengisian referensi ruangan pada Master Aset SIMAN; 4. Melakukan pendataan dan pemutakhiran DBR; a. Update Daftar Barang Ruangan (DBR) b. Verifikasi DBR]
3	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	<i>Gathering</i> dan internal reuiu terhadap WBK/WBBM	Penerapan WBK/ WBBM	Semester I 2019	Selesai	Kegiatan yang telah dilaksanakan: - Internalisasi pihak eksternal dan internal - Pemenuhan kegiatan untuk 6 komponen pengungkit - Survey kepuasan pengguna layanan - Internal review - Upload data pemenuhan komponen pengungkit pada aplikasi DIA
						Hasil yang telah dicapai: 1. Dokumen dalam rangka pemenuhan WBK diupload pada aplikasi DIA. 2. Diusulkan Kementerian Keuangan untuk mengikuti penilaian WBK ke KemenPAN-RB dengan nilai total 96,23 (ND-527/SJ.2/2019).
4	Manajemen Satker yang Berkesinambungan	Monitoring dan evaluasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (Per-25/PB/2018)	Laporan Monev pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	Semester I 2019	Selesai	Produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan Inisiatif Strategis adalah Laporan Monev pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Monev dilakukan hanya rekonsiliasi ketepatan data sedangkan survey Baseline tidak dilakukan karena Tidak terdapat debitur yang memenuhi syarat menjadi obyek survey baik dari aplikasi SIKP-UMi maupun penyalur.
5	SDM yang kompetitif	Program peningkatan kapasitas pegawai terkait literasi	Bimtek penulisan artikel yang baik	Semester I 2019	Selesai	KPPN Painan Telah melaksanakan Pelatihan Teknis Menulis Artikel Pegawai KPPN Painan berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPN Painan Nomor ND-325/WPB.03/KP.06/2019 Tanggal 26 Juni 2019 hal Pelatihan Teknis Menulis Artikel Pegawai KPPN Painan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Aula KPPN Painan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dengan Narasumber Aulia Rahim, S.E., M.P.P.M, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1A, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

LAIN-LAIN

Pada Capaian Kinerja Organisasi KPPN Painan tahun 2019, tidak seluruh IKU dapat menggambarkan pencapaian dari Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun 2015-2019 dikarenakan keterbatasan jumlah IKU yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN , sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam setiap *refinement* Peta Strategi dan IKU Kepala KPPN tiap tahunnya tetap mengacu pada dokumen Renstra Ditjen

Perbendaharaan tahun 2019, Renja Ditjen Perbendaharaan, dan dokumen perencanaan lainnya.

**B. REALISASI
ANGGARAN**

1. Realisasi DIPA KPPN Painan tahun 2019

Berdasarkan data per 21 Januari 2020 dengan menggunakan *online monitoring* SPAN, realisasi penyerapan DIPA KPPN Painan untuk semua jenis belanja sebesar Rp 1.313.856.763,- atau mencapai 97,90% dari total pagu sebesar Rp 1.342.030.000.

Seluruh kegiatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2019, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 216.487.000,- (96,88% dari pagu sebesar Rp 223.455.000,-), belanja barang mencapai sebesar Rp 1.038.726.238,- (98,01% dari pagu sebesar Rp 1.059.863.000,-), dan belanja modal sebesar Rp 58.643.525,- (99,88% dari pagu sebesar Rp 58.712.000,-). Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama periode 2019 dan 2018 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.57.

TABEL 3.57

Realisasi KPPN Painan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun 2019		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Pegawai	223,455,000	216,487,000	96.88%
Belanja Barang	1,059,863,000	1,038,726,238	98.01%
Belanja Modal	58,712,000	58,643,525	99.88%
Total	1,342,030,000	1,313,856,763	97.90%
Jenis Belanja	Tahun 2018		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Pegawai	208,278,000	203,831,000	97.86%
Belanja Barang	1,065,581,000	1,055,798,075	99.08%
Belanja Modal	145,233,000	145,126,981	99.93%
Total	1,419,092,000	1,404,756,056	98.99%

Ket: *) Data pada OM SPAN per 21 Januari 2020

2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA KPPN Painan TA 2019 per Kegiatan dan Output

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan, pada tahun anggaran (TA) 2019 KPPN Painan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut ini ditunjukkan pada Tabel 3.58 :

TABEL 3.58
Realisasi DIPA KPPN Painan Tahun Anggaran 2019 per Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
08	Program: Pengelolaan Perbendaharaan Negara			
1705	Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	1.342.030.000	1.313.856.763	97,90%
1705002	Layanan Pelaksanaan Kuasa BUN di daerah	79.872.000	75.156.201	94,10%
1705003	Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	22.104.000	21.738.750	98,35%
1705951	layanan internal (overhead)	58.712.000	58.643.525	99,88%
1705994	Layanan Perkantoran	1.181.342.000	1.158.318.287	98,05%

*Analisis Efisiensi
Penggunaan atas
Sumber Daya*

3. Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya

**PERHITUNGAN PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO
SATKER KPPN PAINAN
TRIWULAN IV TAHUN 2019**

	Pagu	Realisasi sd TW 4	% Realisasi terhadap Pagu
1	2	3	4=3/2*100%
Pagu Bruto	1,383,104,000	1,313,856,763	94.99%
Faktor Pengurang			
a. Belanja Pegawai	229,995,000	216,487,000	94.13%
b. Self Bloking*	-	-	
c. Hasil Efisiensi IMK**	-	-	
d. Dana Khusus***	-	-	
Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto	1,153,109,000	1,097,369,763	95.17%
Trajectory TW 4			95%
Capaian Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto			100.17%
			100.00%

**PERHITUNGAN KONSISTENSI
SATKER KPPN PAINAN
TRIWULAN IV TAHUN 2019**

Bulan	RPD	Realisasi	IRPD-Realisasi I	Konsistensi Bulanan	Konsistensi Triwulanan
Januari	-	-	-	100.00%	94.83%
Februari	85,328,000	82,314,873	3,013,127	96.47%	
Maret	93,580,000	82,367,114	11,212,886	88.02%	
April	57,276,000	57,275,048	952	100.00%	91.79%
Mei	185,090,000	185,089,764	236	100.00%	
Juni	106,764,000	80,461,666	26,302,334	75.36%	
Sampai dengan Q2					93.31%
Juli	76,668,000	76,667,491	509	100.00%	97.12%
Agustus	102,214,000	103,243,454	1,029,454	98.99%	
September	145,847,000	134,723,693	11,123,307	92.37%	
Sampai dengan Q3					94.58%
Oktober	100,664,000	98,348,743	2,315,257	97.70%	87.73%
November	105,126,000	116,143,773	11,017,773	89.52%	
Desember	277,916,000	211,138,144	66,777,856	75.97%	
Sampai dengan Q4					92.87%

CAPAIAN NILAI IKPA
SATKER KPPN PAINAN
TRIWULAN IV TAHUN 2019

NO	INDIKATOR IKU PERSENTASE KPA	NILAI
1	Revisi DIPA	100.00%
2	Penyelesaian Tagihan	100.00%
3	Pengelolaan UP	100.00%
4	Data kontrak	0.00%
5	Kesalahan SPM	90.00%
6	Retur SP2D	100.00%
7	Renkas	0.00%
8	Penyampaian LPJ*	100.00%
9	Pagu Minus	100.00%
10	Dispensasi	100.00%

CAPAIAN NILAI SMART
SATKER KPPN PAINAN
TRIWULAN IV TAHUN 2019

NO	INDIKATOR IKU PERSENTASE KPA	NILAI
1	Capaian keluaran	98.75%
2	Efisiensi	106.40%

BOBOT INDIKATOR IKU KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER KPPN PAINAN
TRIWULAN IV TAHUN 2019

No	Indikator IKU kualitas pelaksanaan anggaran	Bobot		Nilai	Hasil	Sumber Data
		Normal	TW 4			
1	Capaian keluaran	30%	30%	98.75%	29.63%	SMART
2	Efisiensi	15%	15%	106.40%	15.96%	
3	Penyerapan anggaran neto	15%	15%	100.00%	15.00%	MANUAL
4	Konsistensi	10%	10%	92.87%	9.29%	
5	Revisi DIPA	5%	5%	100%	5.00%	IKPA
6	Penyelesaian Tagihan	4%	4%	100%	4.00%	
7	Pengelolaan UP	4%	4%	100%	4.00%	
8	Data kontrak	3%	0%	0%	0.00%	
9	Kesalahan SPM	3%	3%	90%	2.70%	
10	Retur SP2D	3%	3%	100%	3.00%	
11	Renkas	2%	0%	0%	0.00%	
12	Penyampaian LPJ	2%	2%	100%	2.00%	
13	Pagu Minus	2%	2%	100%	2.00%	
14	Dispensasi	2%	2%	100%	2.00%	
Total		100%	95%	1188.02%	94.57%	

LAPORAN CAPAIAN IKU
PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER KPPN PAINAN
TRIWULAN IV TAHUN 2019

NO	INDIKATOR IKU PERSENTASE KPA	NILAI CAPAIAN	ISU UTAMA DAN IMPLIKASI	AKAR MASALAH	TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN	REKOMENDASI RENCANA AKSI
1	Capaian keluaran	29.63%				
2	Efisiensi	15.96%				
3	Penyerapan anggaran neto	15.00%				
4	Konsistensi	9.29%	Rencana Penarikan Dana yang dijadikan pedoman adalah revisi pertama pada triwulan tersebut	realisasi belanja tidak mencapai target sebagaimana rencana penarikan dana	realisasi belanja berdasarkan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	Realisasi Belanja agar berpedoman pada rencana penarikan dana pada halaman III DIPA.
5	Revisi DIPA	5.00%				
6	Penyelesaian Tagihan	4.00%				
7	Pengelolaan UP	4.00%				
8	Data kontrak	0.00%				
9	Kesalahan SPM	2.70%				
10	Retur SP2D	3.00%				
11	Renkas	0.00%				
12	Penyampaian LPJ	2.00%				
13	Pagu Minus	2.00%				
14	Dispessasi	2.00%				
Total Nilai Triwulan IV Tahun 2019		94.57%				
Total Bobot Triwulan IV Tahun 2019		95.00%				
Capaian IKU Persentase KPA Triwulan IV Tahun 2019		99.55%				

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4
	98.77%	98.41%	98.59%	98.71%	98.63%	99.55%	98.86%

C. KINERJA LAIN-LAIN

Selain 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh KPPN Painan dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPPN Painan juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2019 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Painan tahun 2019, tetapi masih terkait dengan tugas dan fungsi KPPN Painan. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. INOVASI MANAJEMEN/PELAYANAN

Peningkatan layanan dengan berorientasi kepada kepuasan pemangku kepentingan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Kementerian Keuangan pada nilai kesempurnaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah merumuskan standar layanan minimal untuk diterapkan pada unit vertikalnya sehingga dapat dipastikan unit vertikal yang ada memiliki standar layanan yang sama. Penerapan standar layanan minimal ini tidak menghilangkan kesempatan bagi unit vertikal untuk menerapkan inovasi pada unit masing-masing. Setiap tahun juga diadakan lomba inovasi antar unit vertikal yang nantinya inovasi terbaik akan diimplementasikan secara nasional. Berikut inovasi-inovasi yang telah dilakukan pada KPPN Painan:

1. Inovasi Pohon Integritas

Inovasi ini adalah pohon integritas yang berisi definisi integritas menurut masing-masing pegawai KPPN Painan, dengan harapan menjadi pengingat untuk menjaga komitmen integritas pegawai dalam segala aspek

2. Inovasi Pelayanan dalam Bahasa Daerah

Inovasi ini merupakan pembaruan dalam rangka pelayanan kepada satker dengan menggunakan bahasa daerah (bahasa minang). Pelayanan dengan bahasa minang ini dilaksanakan pada setiap hari Kamis minggu pertama setiap bulannya di KPPN Painan

3. Inovasi Konsultasi DAK Fisik-DD melalui Whatsapp Group DAK Fisik-DD

Inovasi ini merupakan whatsapp group yang dibentuk dengan beranggotakan Seksi Bank KPPN Painan (selaku PPK DAK Fisik-DD) dan Pemda, media ini merupakan bentuk mitigasi atas risiko tidak tersalurnya DAK-DD

4. Inovasi Monitoring Data Garansi Bank

Inovasi ini diterapkan untuk mempermudah penyelesaian berkas Garansi Bank dan mempermudah pengawasan Garansi Bank

5. Inovasi Sistem Penghitungan Capaian Kinerja Pegawai

Inovasi ini diterapkan untuk mempermudah subbagian umum melakukan penghitungan capaian kinerja pegawai KPPN Painan sesuai keperluan.

6. Inovasi Penyampaian Dokumen LPJ Bendahara melalui e-mail

Inovasi ini diterapkan untuk mempermudah satker mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Pengeluaran beserta kelengkapannya melalui e-mail

7. Inovasi Konfirmasi Penerimaan melalui Whatsapp Group Penerimaan

Inovasi ini merupakan grup Whatsapp yang beranggotakan Kepala Seksi Bank beserta staf dan semua bendahara pengeluaran dan penerimaan, dimana melalui grup ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses konfirmasi penerimaan

8. Inovasi Sistem Penilaian Pegawai Telada KPPN Painan

Inovasi ini merupakan data berupa kertas kerja yang membantu mempermudah penilaian pegawai yang diusulkan menjadi pegawai teladan

9. Inovasi Menyediakan data yang dibutuhkan stakeholder KPPN Painan (BPJS dan Taspen)

Inovasi ini merupakan link bit.ly yang menyediakan data yang dibutuhkan stakeholder dalam hal ini BPJS Kesehatan dan Taspen agar lebih mudah memperoleh data rutin secara mandiri

10. Inovasi Mendata pihak ketiga/vendor KPPN Painan

Inovasi ini merupakan data yang memetakan ada atau tidaknya hubungan vendor dengan pegawai KPPN Painan dalam rangka mapping kemungkinan terjadinya benturan kepentingan

11. Inovasi Penyampaian Pakta Integritas ketika menjalankan dinas luar

Inovasi ini merupakan alat yang dapat memastikan pegawai yang ditugaskan tetap menjaga integritas dengan tidak menerima imbalan/bingkisan apapun dari stakeholder yang berindikasi gratifikasi

12. Inovasi Poster Pengendalian Gratifikasi dalam bahasa daerah

Poster tersebut berguna sebagai pengingat bagi pegawai, PPNPM, dan stakeholder agar senantiasa menjaga integritas dengan tidak menerima ataupun memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Digunakannya bahasa daerah dalam poster berguna sebagai pengingat yang lebih dekat dengan budaya lokal.

13. Inovasi Database pemegang KIPS

Inovasi ini merupakan tool untuk mempermudah penyelesaian berkas penerbitan KIPS dan sebagai alat pengawasan pemegang KIPS

14. Inovasi Denah Jalur Evakuasi

Inovasi ini merupakan denah/peta yang berisi informasi jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat atau bencana.

2. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) & WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Pada akhir tahun 2017 KPPN Painan sudah memulai pelaksanaan Inisiatif pemberantasan korupsi melalui persiapan penerapan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Persiapan yang dilakukan diantaranya mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan WBK & WBBM.



Selain persiapan diatas, kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada KPPN Painan saat ini pelaksanaannya sampai dengan tahap internalisasi kepada seluruh Pegawai maupun PPNNP KPPN Painan. Internalisasi tersebut disampaikan melalui forum GKM dan *Morning Call*.

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat selaku pembina instansi vertikal DJPb di KPPN lingkup Sumatera Barat, juga turut serta membantu dengan menyampaikan Surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat nomor S-871/WPB.03/KP.142/2018 tanggal 12 Mei 2018 tentang Penyampaian Installer Aplikasi PEPZI. Bahan tersebut menjadi salah satu referensi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dengan standar WBK / WBBM bagi KPPN Painan, disamping KPPN Painan juga telah secara aktif mengumpulkan bahan dan informasi terkait Penerapan Zona Integritas dengan Standar WBK/WBBM dari KPPN lain yang telah sukses menyelenggarakan WBK/ WBBM.

Dalam perjalanan KPPN Painan dalam menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi selama tahun 2017 sampai dengan 2019, KPPN Painan telah mendapatkan sertifikas Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani.

PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) diperingati pada tanggal 9 Desember 2019 dengan tema MAJU LAWAN KORUPSI. Dalam rangka memeriahkan pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia, KPPN Painan menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Menyelenggarakan GKM Internal Hari Anti Korupsi Sedunia
- b. Fun Games
- c. Public Campaign: Pemasangan Banner, Membagikan Stiker "Maju Lawan Korupsi"



Dengan adanya kegiatan dalam rangka memperingati HAKORDIA tahun 2019 memberikan dampak positif kepada seluruh pegawai, PPNPN, dan Satker mitra kerja, yaitu semakin tumbuhnya pemahaman terhadap gerakan anti korupsi serta makin kuatnya komitmen akan budaya anti korupsi di lingkungan unit kerja KPPN Painan.



Pendidikan Anti Korupsi sejak dini



Pada tanggal 30 Agustus 2019, KPPN Painan mengadakan kegiatan edukasi anti korupsi ke salah satu sekolah yang merupakan mitra kerja KPPN Painan yaitu MTSN 3 Pesisir Selatan dengan mengambil tema “PENGUATAN INTEGRITAS SEJAK DINI”. Melalui edukasi ini, diharapkan generasi yang akan datang akan mempunyai integritas dan menjauhi segala yang termasuk dalam korupsi.

BAB IV

PENUTUP

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dalam tahun anggaran 2019 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Painan merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera yang memiliki tugas dan fungsi yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara. Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan KPPN Painan memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara keseluruhan.

Pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan pada tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan pada tahun 2019 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi adalah Nilai Kinerja Organisasi KPPN Painan yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard (BSC) mencapai 108,50% Dari total 19 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada periode mendatang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA (KONTRAK
KINERJA)
TAHUN 2019



**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 142/PB.12/2019**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019**

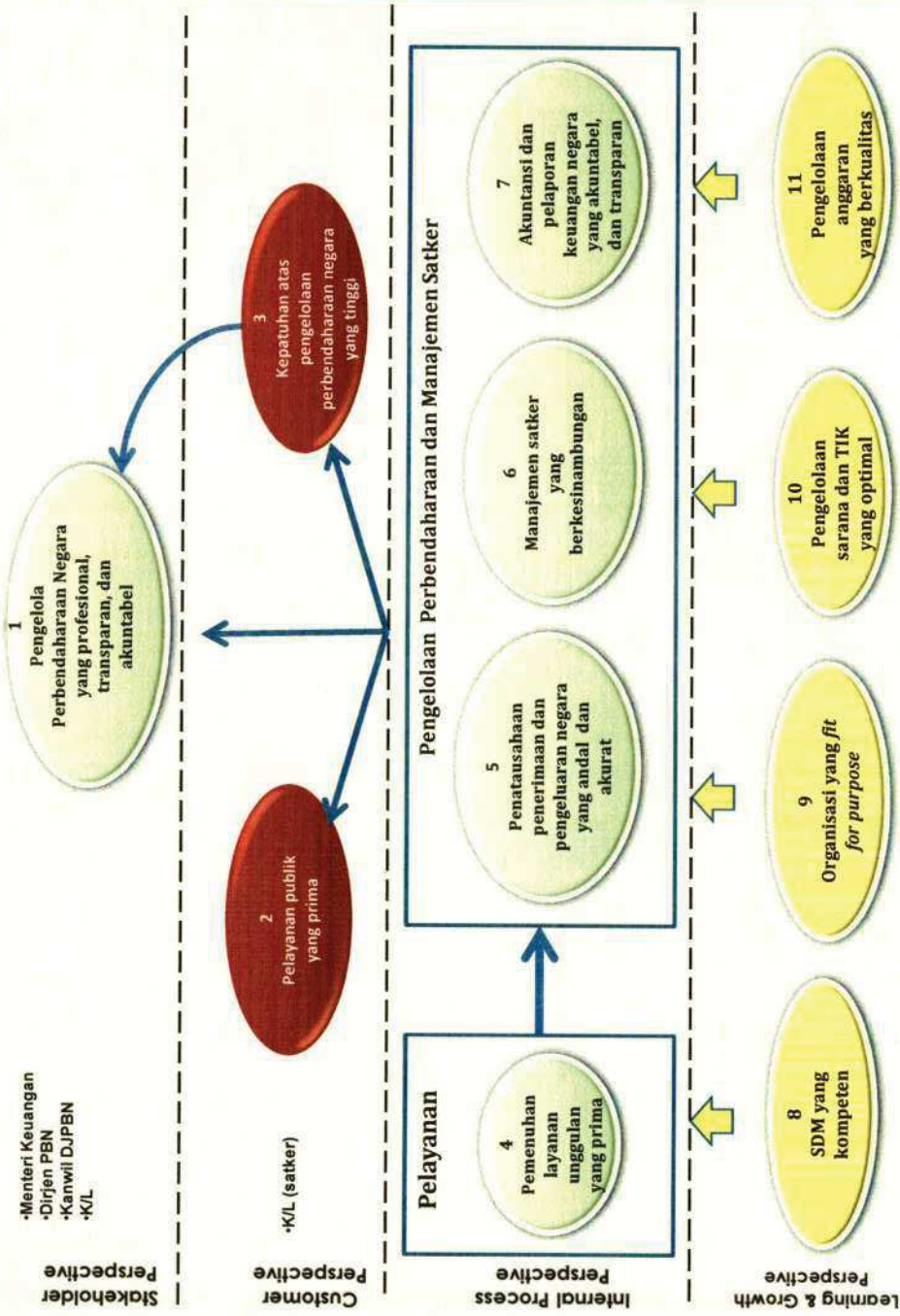
Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

Visi: Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PAINAN**

No (1)	Sasaran Program/ Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target 2018 (4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	88 94
2.	Pelayanan publik yang prima	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,53 (skala 5)
3.	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi	3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal 3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	98,1% 4,5
4.	Pemenuhan layanan unggulan yang prima	4a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
5.	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat	5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	90% 99%
6.	Manajemen satker yang berkesinambungan	6a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 6b-CP Persentase implementasi Aplikasi SAKTI	86 95%
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu 7b-N Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	97,5% 75
8.	SDM yang kompeten	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai 8b-N Persentase kualitas pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i> 8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	77 65% 72
9.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	9a-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	75 83
10.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal	10a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
11.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%

Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Ade Rohman

NIP 196207111982101001

Anggaran

Rp. 1.446.068.000,-

Painan, 31 Januari 2018

Pimpinan Unit Kerja,



Lita Qadarina Hardian

NIP 197509251995112001

Kode SS/IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7b-N	Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	75	75	75	75	75	75	75
VIII	SDM yang kompeten							
8a-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	77	77
8b-N	Persentase kualitas pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i>	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
8c-N	Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	72	72	72	72	72	72	72
IX	Organisasi yang fit for purpose							
9a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	75	75
9b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	83	83
X	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal							
10a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	-	70%	70%	-	70%	92%	92%
XI	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Painan, 31 Januari 2019

PNS yang dinilai,

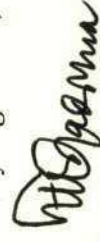


Lita Qadarina Hardian
NIP 197509251995112001

**INISIASI STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019**

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	Program <i>intensive care</i> implementasi PMK Monev Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan PMK Kartu Kredit	Sosialisasi dan bimtek	Semester I 2019	Seksi PD, Seksi MSKI, Seksi Vera, dan Seksi Bank	
2	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	Sensus BMN selain barang dalam KIB	Terbentuknya <i>master asset</i>	Semester II 2019	Subbag Umum	
3	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	<i>Gathering</i> dan internal reuiu terhadap WBK/WBBM	Penerapan WBK/ WBBM	Semester I 2019	Subbag Umum dan Seksi MSKI	
4	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Monitoring dan evaluasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (Per-25/PB/2018)	Laporan Monev pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	Semester I 2019	Seksi Bank	
5	Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	Program peningkatan kapasitas pegawai terkait literasi	Bimtek penulisan artikel yang baik	Semester I 2019	Subbag Umum	

Painan, 31 Januari 2018
PNS yang dinilai,



Lita Qadarina Hardian
NIP 197509251995112001

Sasaran Kerja Pegawai

I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
No	Nama	Ade Rohman	Nama	Lita Qadarina Hardian		
1	NIP	196207111982101001	NIP	197509251995112001		
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Gol. IV/a		
4	Jabatan	Kepala Kantor	Jabatan	Kepala Kantor		
5	Unit Kerja	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan		
III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN		AK	TARGET			
No			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	88	100	12 bln	-
2	Mewujudkan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	-	94	100	12 bln	-
3	Mewujudkan kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,53 (skala 5)	100	12 bln	-
4	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	12 bln	-
5	Mewujudkan kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	-	4,5	100	12 bln	-
6	Mewujudkan penyelesaian SP2D secara tepat waktu	-	99,4%	100	12 bln	-
7	Mewujudkan akurasi rencana penarikan dana satker	-	90%	100	12 bln	-
8	Mewujudkan akurasi penyaluran dana SP2D	-	99%	100	12 bln	-
9	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	86	100	12 bln	-
10	Mewujudkan pelaksanaan implementasi Aplikasi SAKTI	-	95%	100	12 bln	-
11	Mewujudkan penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	-	97,5%	100	12 bln	-
12	Mewujudkan Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	-	75	100	12 bln	-
13	Mewujudkan nilai rata - rata <i>hard competency</i> pejabat/pegawai KPPN yang baik	-	77	100	12 bln	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
14	Mewujudkan kualitas pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i>	-	65%	100	12 bln	-
15	Melaksanakan literasi perbendaharaan	-	72	100	12 bln	-
16	Mewujudkan nilai hasil kualitas laporan evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	75	100	12 bln	-
17	Memenuhi nilai pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> yang berkualitas	-	83	100	12 bln	-
18	Mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal	-	92%	100	12 bln	-
19	Mewujudkan kualitas pelaksanaan anggaran di KPPN	-	95%	100	12 bln	-

Pejabat Penilai,



Ade Rohman
NIP 196207111982101001

Painan, 31 Januari 2019
PNS yang dinilai,



Lita Qadarina Hardian
NIP 197509251995112001

LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019

**EVENT CALENDER (KALENDER KEGIATAN)
KPPN PAINAN
PERIODE TAHUN 2019**

NO.	BULAN	TANGGAL KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	DESKRIPSI EVENT DAN PESERTA	PERKIRAAN DANA	PIC
1	Januari	24 Januari 2019	Perbendaharaan Menyapa	MIN 7 Pesisir Selatan	Salah satu Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan. Kegiatan ini diselenggarakan KPPN Painan dengan mengikutsertakan beberapa siswa/i berprestasi untuk mengenalkan peran Perbendaharaan dalam mengelola Keuangan Negara dan Pembangunan	1.500.000	Kepala Seksi Bank
2		03 Januari 2019	Rapat UPR, DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Semester II tahun 2018	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Semester II Tahun 2018. Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
3		14 Januari 2019	GKM Kode Etik Pegawai DJPb Sesuai PMK No.190/PMK.01/2018	Aula KPPN Painan	GKM Kode Etik Pegawai DJPb dihadiri seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
4		16 Januari 2019	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2018 dan penyerahan penghargaan kepada operator beprestasi	Aula KPPN Painan	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2018, penyerahan penghargaan kepada operator beprestasi, serta dilanjutkan dengan senam yang dihadiri oleh operator satker	5.000.000	Seksi Vera KI
5		31 Januari 2019	Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2018	Aula KPPN Painan	Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2018 oleh Seluruh Pegawai	-	Seksi Vera KI
6		23 Januari 2019	FGD Pelaksanaan Anggaran 2019 dan Tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan	Aula KPPN Painan	FGD dan Kegiatan Refleksi (Tasyakuran) Hari Bakti Perbendaharaan yang mengikutsertakan seluruh pegawai, dan satker mitra kerja KPPN Painan	5.000.000	Seksi PDMS
7		23 Januari 2019	Rapat WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Pembahasan rencana kerja tim pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Pada KPPN Painan Tahun 2019 yang dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI

8		31 Januari 2019	Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Memorandum Anti Gratifikasi	Aula KPPN Painan	Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2019 dan memorandum anti gratifikasi oleh Seluruh Pegawai	-	Subbag Umum Seksi Vera KI
9	Februari	07 Februari 2019	DKO dan Performance Dialogue pencapaian IKU bulanan	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja bulan sebelumnya, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
10		08 Februari 2019	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
11		07 Februari 2019	Rapat Progress WBK/WBBM	Ruang Rapat Kepala Kantor	Dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI
12		12 Februari 2019	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
13		21-22 Feb 2019	Pembinaan ke satker	Ke satker		900.000	Seksi Vera KI
14		21 Februari 2019	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
15		27 Februari 2019	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum
16	Maret	01 Maret 2019	Rapat Progress WBK/WBBM	Ruang Rapat Kepala Kantor	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
		05 Maret 2019	DKO dan Performance Dialogue pencapaian IKU bulanan	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja bulan sebelumnya, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
		08 Maret 2019	Service Excellent dan Public Speaking Semester I	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	1.500.000	Seksi PDMS
		11 Maret 2019	Pemilihan pegawai terbaik	KPPN Painan	Pemilihan pegawai terbaik	500.000	Subbag umum
19		20-21 Maret 2019	Monev DAK Fisik dan Dana Desa	Pemda	Melakukan monev ke Pemda terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	600.000	Seksi Bank

20		18-19 Maret 2019	Monev Layanan Bank/Pos Persepsi Triwulan I	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan monev bank/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNA	450.000	Seksi Bank
21		12-15 Maret 2019	Monev Realisasi Belanja	Satuan Kerja	Melakukan monev pelaksanaan anggaran dan LK ke beberapa satuan kerja	1.800.000	Seksi PDMS
22		Minggu I Maret 2019	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum
23		Minggu II Maret 2019	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
24		Minggu III Maret 2019	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
25		Minggu IV Maret 2019	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
27	April	02 April 2019	DKO dan Performance Dialogue pencapaian IKU Triwulan I Tahun 2018	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja bulan sebelumnya, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
		4 April 2019	Rapat Progress WBK/WBBM	Ruang Rapat Kepala Kantor	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
		April 2019	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai: Pelatihan Literasi	Aula KPPN Painan	Kegiatan Pelatihan Literasi diikuti oleh seluruh pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun artikel, laporan dan tulisan lainnya	1.500.000	Subbag Umum
		April 2019	Capacity Building	Luar kota	Kegiatan Capacity building diikuti oleh seluruh pegawai, PPNPN dan Keluarga	16.848.000	Subbag Umum
28		April 2019	GKM Internalisasi Kode Etik dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai dengan pengarahan oleh Kepala Kantor dan Kepala Seksi Vera KI	130.000	Seksi Vera KI
30		April 2019	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum
31		April 2019	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
32		April 2019	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS

33	Mei	Mei 2019	DKO dan Performance Dialogue pencapaian IKU bulanan	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja bulan sebelumnya, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
34		Mei 2019	Monev DAK Fisik dan Dana Desa	Pemda	Melakukan monev ke Pemda terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	600.000	Seksi Bank
		18-21 Mei 2019	Survey kepuasan pengguna layanan eksternal	KPPN Painan	Survey dilakukan terhadap seluruh pengguna layanan KPPN untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan indeks tertentu yang ditetapkan	1.889.000	Subbag Umum
35		Mei 2019	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum
36		Mei 2019	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
37		Mei 2019	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
38		Mei 2019	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
40	Juni	Juni 2019	DKO dan Performance Dialogue pencapaian IKU bulanan	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja bulan sebelumnya, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
41		Juni 2019	Monev layanan bank/ pos persepsi Tw II dan Kredit Monev UMi	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan monev bank/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNA Serta Monev terhadap Kredit UMi	450.000	Seksi Bank
		Juni 2019	Monev Kredit Program UMi	Debitur dan LKBP	Melakukan monev terhadap Kredit Program UMI ke Debitur dan LKBP	600.000	Seksi Bank
43		Juni 2019	FGD DAK Fisik DD	Aula KPPN Painan	Melakukan FGD dengan Pemda terkait kelengkapan dokumen penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	6.000.000	Seksi Bank
44		19 Juni 2019	Survey kepuasan pengguna layanan internal	KPPN Painan	Survey dilakukan terhadap seluruh pegawai KPPN Painan untuk mengetahui tingkat kepuasan para pegawai terhadap layanan internal KPPN dengan indeks tertentu yang ditetapkan	-	Subbag Umum
48		Minggu 1	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum

46		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
47		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
48		Minggu 4	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
49	Juli	Juli 2019	Performance Dialogue pencapaian IKU Semester I Tahun 2018	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja semester I tahun 2018, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
50		Minggu 1	Bimtek Pendampingan penyusunan LK Tk UAKPA semester I Tahun 2019	Aula KPPN Painan	Bimtek Pendampingan penyusunan LK Tk UAKPA semester I Tahun 2019 Diikuti oleh seluruh satuan kerja mitra KPPN Painan	6.000.000	Seksi Vera KI
51		Minggu 1	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum
52		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
53		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
54		Minggu 4	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
55	Agustus	Agustus 2019	Performance Dialogue pencapaian IKU bulanan	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja bulan sebelumnya, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
56			Monev DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan III	Pemda	Melakukan monev ke Pemda terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan III	600.000	Seksi Bank
57			Pelatihan Damkar dan evakuasi bencana	outdoor	Pelatihan Damkar dan evakuasi bencana yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Painan dengan mengundang Pemadam Kebakaran	1.500.000	Subbag Umum
58		Minggu 1	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum

59		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
60		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
61		Minggu 4	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
62	September	September 2019	Performance Dialogue pencapaian IKU bulanan	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja bulan sebelumnya, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
63		September 2019	Monev Layanan Bank/Pos Persepsi Triwulan III 2018	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan monev babnk/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNA	450.000	Seksi Bank
64		September 2019	Monev Realisasi Belanja		Melakukan monev pelaksanaan anggaran ke beberapa satuan kerja	900.000	Seksi PDMS
65		Minggu 1	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum
66		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
67		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
68		Minggu 4	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
69	Oktober	Oktober 2019	Performance Dialogue pencapaian IKU Trw III Tahun 2018	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Trw III Tahun 2018, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
70		Minggu ke 3	Pelatihan Service Excellent	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan layanan kepada stakeholders dengan melibatkan pihak luar sebagai motivatornya	1.250.000	Subbag Umum
71		Oktober 2019	Sosialisasi LLAT 2018	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh satuan kerja dan bank/ pos persepsi mitra kerja KPPN Painan sebagai pedoman	8.000.000	Seksi PDMS dan Seksi Bank

					pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara akhir tahun anggaran		
72		Minggu 1	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum
73		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
74		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
75		Minggu 4	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
76	November	November 2019	Performance Dialogue pencapaian IKU bulanan	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja bulan sebelumnya, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum
77		November 2019	Monev DAK Fisik dan Dana Desa	Pemda	Melakukan monev ke Pemda terkait penyaluran DAK Fisik/DD	600.000	Seksi Bank
78		November 2019	Monev Kredit Program	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan Monev Kredit Program ke Bank Mitra Kerja KPPN Painan,	600.000	Seksi Bank
		November 2019	Survey kepuasan pengguna layanan eksternal	KPPN Painan	Survey dilakukan terhadap seluruh pengguna layanan KPPN untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan indeks tertentu yang ditetapkan	1.889.000	Subbag Umum
79		Minggu 1	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum
80		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
81		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
82		Minggu 4	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank
83	Desember	Desember 2019	Performance Dialogue pencapaian IKU bulanan	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja bulan sebelumnya, Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130.000	Subbag Umum

84		Desember 2019	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran 2020 dan Penyerahan DIPA 2019	Aula KPPN Painan		10.000.000	Subbag umum
85		31 Desember 2019	Monitoring Layanan Penerimaan Negara Akhir Tahun 2018	Aula KPPN Painan	Melakukan monev penerimaan Negara pada akhir tahun 2018 ke bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Painan	450.000	Seksi Bank
86		Minggu 1	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Subbag Umum
87		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi PDMS
88		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Vera KI
89		Minggu 4	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	130.000	Seksi Bank

Painan, Januari 2019
Kepala Kantor



Lita Qadarina Hardian

LAMPIRAN 3
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2019

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan
: 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel	1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran KL 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	88% 94	97.68% 99.36	111.00% 105.70%
2	Pelayanan Publik yang Prima	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	4.53 98.10	4.90 100	108.17% 101.94%
3	Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi	3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah 4a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	4.5 99.40%	5 99.72%	111.11% 100.32%
4	Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima	4a-N Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 5a-CP Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	90% 99%	100.00% 99.96%	111.11% 100.97%
5	Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat	5b-N Persentase akurasi edukasi dan komunikasi 6a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86 95%	88.75 100.00%	103.20% 105.26%
6	Manajemen Satker yang Berkesinambungan	6b-CP Presentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	97.50%	99.78%	102.34%
7	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu	7a-N Presentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu 7b-N Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	75 77	97.35 87.17	120.00% 113.21%
8	SDM yang Kompetitif	8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai 8b-N Persentase kualitas pelaksanaan coaching dan counseling 8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	65% 72	99.31% 89.25	120.00% 120.00%
9	Organisasi yang Kondusif	9a-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization	75 83	95.83 86.98	120.00% 104.80%
10	Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal	10a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	103.69%	112.71%
11	Pengelolaan Anggaran Yang Optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	98.86%	104.06%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019

: Rp 1.342.030.000,-
: Rp 1.313.856.763,-

Kepala KPPN Painan

Lita Qadafina Hardian
NIP 197509251995112001



LAMPIRAN 4

LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU